YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGURUSAN KARTU TANDA DAFTAR PEDAGANG (TDP) (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA AREA CAR FREE DAY) KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Princilia Juliani
NPM: 167110473

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	: Princilia Juliani
NPM	: 167110473
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Fre Day) Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub- sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan normatif da kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 26 Maret 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Ketua

Hendry Andry, S.Sos, M.Si

Pembimbing

La Ode Syarfan., SE., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	:	Princilia Juliani
NPM	:	167110473
Program Studi	:	Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik dapat menyetuji dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 19 Maret 2020

Ketua

Nurmasari,S.Sos.,M.Si

Sekretaris

Andri Kurniawan, B.PM, M.Si

Anggota

La Ode Syarfan, SE.,M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP.,Msi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

==========

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 067/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 18 maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 Maret 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konfrehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	Princilia Julianai
NPM	:	167110473
Program Studi	:	Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	**Pengawasan Dinas PErindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagangang Kaki Lima Are Car Free Day) Kota Pekanbaru.**
Nilai Ujian	:	Angka : "84,53" ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian	:	Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Ketua	1.
2.	Andri Kurniawan, BPM., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	La Ode Syarfan, SE., M.Si.	Anggota	3.
4.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si.	Notulen	4.

Pekanbaru, 19 Maret 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 067/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	:	**Princilia Juliani**
N P M	:	167110473
Program Studi	:	Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Perdagangan kaki Lima Are Car Free Day) Kota Pekanbaru.

1. Nurmasari.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Andri Kurniawan,.BPM.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. La Ode Syarfan.,S.Sos,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Eko Handrian.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Maret 2020
An. Dekan,

DR.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :
1.Yth. Bapak Rektor UIR
2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3.Yth. Ketua Prodi AP
4.A r s i p --------sk.penguji---------

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Princilia Juliani
NPM	:	167110473
Program Studi	:	Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 26 Maret 2020

An. Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Nurmasari, Sos.,M.Si	Andri Kurniawan, B.PM, M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S,IP., M.Si

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian Skripsi ini yang berjudul. "Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Fre Day) Kota Pekanbaru". Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogya M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Nurma Sari, S.Sos., M.Si selaku skretaris Program Studi Administrasi Publik.
5. Bapak La Ode Syarfan, SE., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama proses bimbingan berlangsung.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah- mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Teristimewa dengan ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Ayahanda Nasir. J dan Ibunda tercinta Nurhayati , dan untuk ke enam saudara saya Misrawati, Nazuwin, Rubiyah, Sardani, Musdayana, Rahmat Kurnia, yang selalu memberikan do'a dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, dan selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa.
8. Kepada orang-orang yang saya sayangi, teman- teman Administrasi Publik angkatan 2016 terkhususnya kelas C yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. Kepada sahabat saya yang selalu memberikan doa, semangat serta menemani penulis sampai saat ini : Wedona Veronita Cherlin, Winda Evrilia Putri, Rizky Oktavia, Melda Nopita dan Siti Khumaiyah. Serta tutor yang selalu membantu dalam pembuatan skripsi ini (Samsi Nurzaman, S.AP dan Elya Puspita Sari, S.AP)
10. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah memberikan informasi baik melalui wawancara, data dan dokumentasi sehingga bisa melancarkan penyusunan skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar HIMIA FISIPOL UIR beserta teman-teman terdekat yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata hanya ucapan terimakasih yang bisa diberikan oleh penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 26 Maret 2020
Penulis

Princilia Juliani

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **ii**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**

BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI ..... **iv**

SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI ..... **v**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH ..... **xviii**

ABSTRAK ..... **xix**

ABSTRACT ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 24
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 24
   1. Tujuan Penelitian 24
   2. Kegunaan Penelitian 25

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR **26**

A. Studi Kepustakaan 26
   1. Konsep Administrasi 26
   2. Konsep Organisasi 28
   3. Konsep Manajemen 31
   4. Konsep Sumber Daya Manusia 33
   5. Konsep Kebijakan Publik 35
   6. Konsep Pengawasan 36
   7. Konsep Kartu Tanda Daftar Pedagang 39
   8. Konsep Pedagang Kaki Lima 39

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Kerangka Pikir 40
C. Hipotesis 40
D. Konsep Operasional 41
E. Operasional Variabel 43
F. Teknik Pengukuran 44

BAB III METODE PENELITIAN 51

A. Tipe Penelitian 51
B. Lokasi Penelitian 52
C. Populasi dan Sampel 53
D. Teknik Penarikan Sampel 54
E. Jenis dan Sumber Data 55
F. Teknik Pengumpulan Data 56
G. Teknik Analisis Data 58
H. Jadwal Kegiatan Penelitian 59

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 60

A. Sejarah Ringkasan 60
B. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 62
C. Strukur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 63
D. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 64
E. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 65
F. Sumber Daya Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 88

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 91

A. Identitas Responden 91
1. Jenis Kelamin 92
2. Usia Responden 92
3. Jenis Usaha Responden 93
B. Analisis Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) Kota Pekanbaru 94
1. Menetapkan Standar 94
2. Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar 100
3. Mengambil Tindakan Perbaikan 104
C. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden 117
D. Faktor Penghambat 122

BAB VI PENUTUP 124

A. KESIMPULAN 124

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. SARAN..... 127

DAFTAR KEPUSTAKAAN 129

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I. 1 :	Daftar Jumlah Pedagang Kaki Lima di Bidang Pasar pada Dinas Prindustrian dan Perdagangan Area Car Free Day Kota Pekanbaru.....	16
I. 2	Permohonan Perpanjangan kartu Tanda Daftar Pedagang.....	17
I. 3	Data Jumlah Pedagang Kaki Lima yang Sudah Memiliki dan yang Belum memiliki Kartu Tanda daftar Pedagang (TDP)	18
II. 1 :	Operasional Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru.....	43
II. 2 :	Pengukuran Skala Likert.....	45
II. 3 :	Penelitian Terdahulu	49
III.1 :	Populasi Dan Sampel di Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima dalam Penelitian Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru.....	54
III.2 :	Jadwal waktu kegiatan peneliti tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Pekanbaru.....	59
IV.1 :	Data THL Bidang Pasar	82
IV.2 :	Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan.....	89
IV.3 :	Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan/ Ruang	89
IV.4 :	Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Diklat Kepemimpinan.....	89
IV.5 :	Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Struktural....	90
V.1 :	Distribusi Jumlah Responden Pedagang Kaki Lima Menurut Jenis Kelamin di Area Car Free Day Kota Pekanbaru.....	92
V.2 :	Distribusi Jumlah Responden Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Area Car Free Day Kota Pekanbaru Menurut Usia	93

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

V.3 : Distribusi Jumlah Responden Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Jenis Usaha di Area Car Free Day Kota Pekanbaru 93

V.4a: Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang sudah Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 95

V.4b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang sudah Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ... 97

V.5a: Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang sudah Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 101

V.5b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang sudah Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ... 102

V.6a: Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang sudah Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 105

V.6b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang sudah Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ... 106

V.7a: Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang belum Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) mengenai Indikator Menetapkan Standar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 108

V.7b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang belum Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) mengenai Indikator Menetapkan Standar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 110

V.8a: Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang belum Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ... 111

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

V.8b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang belum Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 113

V.9a: Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang belum Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 115

V.9b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang belum Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ... 116

V.10a: Rekapitulasi Tanggapan responden yang sudah memiliki kartu tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru 118

V.10b: Analisis Rekapitulasi Tanggapan responden yang sudah memiliki kartu tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru 118

V.11a: Rekapitulasi Tanggapan responden yang belum memiliki kartu tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru 120

V.11b: Analisis Rekapitulasi Tanggapan responden yang belum memiliki kartu tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru 121

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

I. 1 : Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9

II.1 : Kerangka Pikir Tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda daftar Pedagang (TDP) (studi kasus Pdagang kaki lima Area Car Free Day) Pekanbaru..... 40

IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 63

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Daftar Kusioner (untuk responden pedagang kaki lima area Car FreeDay Kota Pekanbaru) penenlitian tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda daftar Pedagang (TDP) (studi kasus Pdagang kaki lima Area Car Free Day) Pekanbaru 134
2. Daftar Pedoman Wawancara penelitian tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda daftar Pedagang (TDP) (studi kasus Pdagang kaki lima Area Car Free Day) Pekanbaru 140
3. Rekap Telly data penelitian tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda daftar Pedagang (TDP) (studi kasus Pdagang kaki lima Area Car Free Day) Pekanbaru 152
4. Photo Dokumentasi Hasil Observasi penelitian tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda daftar Pedagang (TDP) (studi kasus Pdagang kaki lima Area Car Free Day) Pekanbaru 154
5. SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi atas nama Princilia Juliani 169
6. Surat Plagiasi 170
7. Surat Rekomendasi Riset dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 702/E-UIR/27-FS/20199 171
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu 172
9. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru tentang pelaksanaan Riset/ Prariset dan pengumpulan data untuk bahan olahan 173
10. Surat Balasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 174

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan di Bawah ini :

Nama	: Princilia Juliani
NPM	:167110473
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian	: Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Areal Car Free Day) Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat)yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah- kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseleuruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Maret 2020

Princilia Juliani

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGURUSAN KARTU TANDA DAFTAR PEDAGANG (TDP) (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA AREA CAR FREE DAY) KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Princilia Juliani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan kartu tanda daftar pedagang. Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif karena peneliti ingin mengambarkan fenomena yang terjadi dilapanagan pada saat tertentu serta ingin mendapatakan data yang akurat. Dengan cara penarikan sampel menggunakan teknik sensus dan teknik *randowm sampling* dimana teknik mengambil sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Peneliti menggunakan indikator dari Mockler dalam Zulkifli (2005:256) tentang pengawasan yaitu menetapkan standar, membandingkan kinerja sesuai dengan standard dan mengambil tindakan perbaikan. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaa, mendesain system umpan balik informasi, membandingkan kinerja standar yang telah ditetapkan dengan kinerja aktual, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mngukur signifikan penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efektif dan efisien. hasil penelitian menunjukan bawasannya untuk keseluruhan indikator pada pedagang kaki lima yang sudah memiliki kartu berada pada jumlah skor 201 dalam skala 180-300 dikategorikan pada kurang terlaksana, sedangkan untuk keseluruhan indikator pada peda pedagang yang belum punya memiliki kartu pada jumlah skor 192 dalam skala 180-300 dikategorikan pada "kurang terlaksana.

Kata Kunci : Pengawasan, Kartu Tanda Daftar Pedagang, Pedagang Kaki Lima

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SUPERVISION OF INDUSTRIAL AND TRADE DEPARTMENTS IN THE MANAGEMENT OF TRADERS CARDS (TDP) (CASE STUDY OF FIVE AREA CAR FREE DAY FOOT TRADERS) PEKANBARU CITY

ABSTRACT

This study aims to determine the Supervision of the Department of Industry and Trade in the Management of merchant registration cards. This research uses descriptive research using quantitative methods because researchers want to describe phenomena that occur in the field at certain times and want to get accurate data. By taking samples using census techniques and Randowm sampling techniques where the technique of taking samples is done randomly without regard to strata that exist in the population. Researchers use indicators from Mockler in Zulkifli (2005: 256) about supervision namely standards, comparing performance according to standards and taking improvements. Supervision is a systematic effort to set standards with planning goals, design information feedback systems, compare the performance of predetermined standards with actual performance, determine whether they contain significant deviations and measure attackers, and take corrective assistance needed to find company resources which is used wherever possible more effective and efficient. the results of the study show that the overall indicator for the street vendors who have owned a card with a score of 180 on a scale of 180-300 is categorized as underperforming, whereas for the overall indicator on the traders who have inventory on a total score of 192 on a scale of 180-300 categorized on " less done"

Keywords : Supervision, Merchant Registration Card, Street Vendors

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari interaksi manusia dalam melakukan suatu kerjasama (*cooperative*) melalui penggunaan sarana dan sumber daya yang terbatas (*limited Resource)* administrasi tidak lebih dari kegiatan ketatausahaan (*clerical work*), biasanya menyangkut tugas pekerjaan/ urusan keuangan. Kepegawaian, kearsiapan, dokumentasi, logistik, korespondensi, teknis, operasional program, layanan informasi serta pengawasan yang bersifat administrasi.

Salah satu kegiatan administrasi adalah pengawasan yang merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana (Siagian, 2008 : 201).

Siagian (2003 : 112) pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam setiap kegiatan organisasi pengawasan begitu penting untuk dilakukan mengingat bahwasannya pengawasan merupakan salah satu fungsi

manajemen yang guna menjamin setiap kegiatan yang telah direncanakan akan terlaksana dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suatu organisasi.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agara apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan - kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu saat itu juga maupun waktu-waktu yang akan datang.

Definisi Pedagang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012, tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Bab 1 Pasal 1 di Ketentuan Umum, dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi teknis Pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pekanbaru, Khususnya kebijakan pemerintahan Kota Pekanbaru di sektor Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru di tetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Dearah Kota Pekanbaru di Bidang Perinduistrian dan Perdagangan. Dalam Undang-Undang No 5 tahun 1984 yang dimakasudkan dengan Perindustrian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Salah satu tugas pokok dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Bidang Pasar yaitu menata kelola pedagang didalam pasar.

Memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah salah satu masalah penduduk di kota Pekanbaru yang sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Kualitas penduduk yang rendah dan jumlah penduduk yang banyak bepengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan arus mobilitas meningkat, sehingga kebutuhan alat transportasi meningkat dan kebutuhan energy seperti minyak bumi juga meningkat, yang mana hal ini dapat menyebakan pencemaran udara dan persediaan minyak bumi menipis. Perlahan tetapi pasti semakin jelas aspek-aspek kemorosotan lingkungan mulai nampak bagi masyarakat kota Pekanbaru. Bagaimanapun juga adalah sulit

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sekali untuk tidak mengindahkan bau busuk yang berasal dari saluran air kita yang terbuka atau mencucurkan air mata bila menghirup udara yang bercampur dengan gas-gas beracun dan partikel-partikel padat yang bertebaran di udara pada kebanyakan wilayah kota besar kita. Walaupun polusi udara yang berasal dari industri kendaraan bermotor sifatnya serius namun mungkin polusi inilah yang paling mudah dipecahkan dari sekian banyak masalah-masalah polusi.

Solusi dalam pemecahan masalah ini adalah pemerintah kota Pekanbaru mengadakan suatu program yaitu untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara yang dikenal dengan sebutan Hari Bebas Kendaran Bermotor (HBKB) atau Car Free Day.

Car Free Day merupakan salah satu event atau kegiatan yang selalu dinantikan oleh masyarakat pekanbaru setiap akhir pekan, kegiatan ini berlokasi di Sudirman. Adapun dampak positif dari kegiatan Car free day ini yaitu : menumbuhkan semangat masyarakat dalam berolahraga, mengurangi kemacetan dan jumlah kendaraan yang sering menyebabkan polusi sehingga dengan begitu kondisi kualitas udara yang secara bertahap akan mulai membaik, kegiatan Car Free Day ini juga sering digunakan sebagai wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan sosial dan sebagainya. Selain itu kegiatan Car Free Day ini juga dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan di area tersebut.

Besarnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Car Free Day ini sehingga pedagang kaki lima memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berjualan. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga telah memberikan izin kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

para pedagang kaki lima untuk berjualan diarea yang telah ditentukan, tetapi dengan syarat pedagang kaki lima tersebut harus mendaftarkan kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) terlebih dahulu. Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) untuk pedagang kaki lima yang berjualan di area Car Free Day pengurusannya yaitu ke Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kartu ini berlaku hanya untuk pedagang kaki lima yang berjualan di area Car Free Day saja, dan untuk pedagang yang memiliki ruko ataupun swalayan pengurusan kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) tersebut yaitu ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pada tahun 2015 pedagang kaki lima yang berjualan di Area Car Free Day sebelumnya berlokasi di jalan Diponegoro, dan untuk mekanisme pembuatan kartu tanda daftar pedagang, dimana pedagang mengurus surat pengantar dari Lurah kemudian ke kantor Camat setelah itu baru langsung ke Bidang Pasar. Namun setelah Car Free Day di Pindah kan ke jalan Cut Nyak Dien tepatnya pada tahun 2018 maka mekanisme pembuatan kartu tersebut dialih kan ke bidang pasar langsung tanpa harus melalui lurah dan camat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 196 Tahun 2017 Tanggal 21 Agustus 2017 menerangkan bahwa seluruh pedagang kaki lima yang menjalankan usahanya di Kota Pekanbaru harus mendaftarkan usahanya ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Adapun tata cara pendaftaran usaha bagi pedagang kaki lima meliputi :

Pemohon harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. KTP Pekanbaru
b. Pas Photo terbaru warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (Dua) Lembar
c. Mengisi formulir yang memuat tentang :
   - Nama
   - Alamat / tempat tinggal / lama tinggal di kota
   - Bidang usaha yang dimohon
   - Tempat usaha yang dimohon
   - Waktu usaha
   - Perlengkapan yang digunakan
d. Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha yang di bubuhi dengan materai RP. 6000 (enam ribu rupiah)
e. Mengisi surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum
f. Mengisi formulir surat pernyataan penggunaan tempat usaha PKL
g. Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat
   1. Tidak memperdagangkan barang illegal
   2. Tidak merombak, menambah, dan mnegubah fungsi srta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi pedagang kaki lima
   3. Tidak memindahtangankan kartu tanda daftar pedaggang (TDP) kepada pihak lain
   4. Kesanggupan menggosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha pedagang kaki lima, apabila :
      a. Lokasi dimaksud sweaktu waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya
      b. Lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan
      c. Setelah di evaluasi pedagang kaki lima dinilai layak menjadi usaha kecil

Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka pedagang harus menunggu sampai kartu tersebut telah selesai di cetak yaitu kurang lebih 2 bulan. Dimana, Bidang Pasar memberi waktu selama satu bulan kepada pedagang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

khusus untuk pendaftaran, dan selebihnya para pedagang menunggu hingga kartu tersebut dikeluarkan. Sementara itu, Bidang Pasar akan memberikan kartu tanda daftar pedagang sementara sebagai pegangan pedagang sampai kartu yang asli dikeluarkan.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti terhadap Kepala Bidang Pasar yaitu bapak Suhardi, Pedagang yang berjualan di area Car Free Day wajib mendaftarkan diri dan memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang saat berjualan. Dimana bagi pedagang yang tidak memiliki kartu maka akan diberikan sanksi dan tidak di perbolehkan berjualan diarea yang telah ditentukan.

Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan khususnya Bidang Pasar untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di area Car Free Day Kota Pekanbaru yaitu dengan menerbitkan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP). Dengan Diterbitkannya kartu tanda daftar pedagang ini yaitu agar pedagang kaki lima yang berjualan memiliki tempat yang telah disedia dan ditentukan sehingga tidak menganggu aktivitas masyarakat dan menutupi jalan, serta diharapkan para pedagang menjadi lebih tertib, tertata dan taat akan peraturan ketika mereka berjualan. Meskipun Dinas Perindustrian dan perdagangan telah menerbitkan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP), namun masih terdapat pedagang yang berjualan di area Car Free Day yang tidak memiliki dan bahkan ada yang sudah punya kartu dan masa berlaku nya sudah habis masih ada pedagang yang belum memperpanjang kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP),

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahkan area di Ruang Terbuka Hijau yaitu taman kacang mayang juga dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima sebagai tempat untuk berjualan.

Hal ini ketahui dari wawancara singkat yang telah dilakukan penulis terhadap beberapa pedagang dan juga salah satu penanggung jawab Minimarket Hamdalah yang berlokasi tidak jauh area Car Free Day. Penulis juga sempat mewawancarai bapak Suhardi selaku kepala bidang pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dimana dari wawancara singkat tersebut di peroleh informasi, bahwa benar adanya pedagang yang tidak memiliki dan masih ada yang belum memperpanjang kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP). Maka dari itu perlunya dilakukan pengawasan serta penataan terhadap pedagang kaki lima tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pedagang kaki lima, pada pasal 3 juga dijelaskan (1) setiap pedagang kaki lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha, (2) untuk mewujudkan kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan.

Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya masih banyak pedagang kaki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lima yang tidak memperhatikan kepentingan umum tadi salah satunya yaitu ketertiban dan kebersihan.

Gambar I.1 : Struktur Organisasi

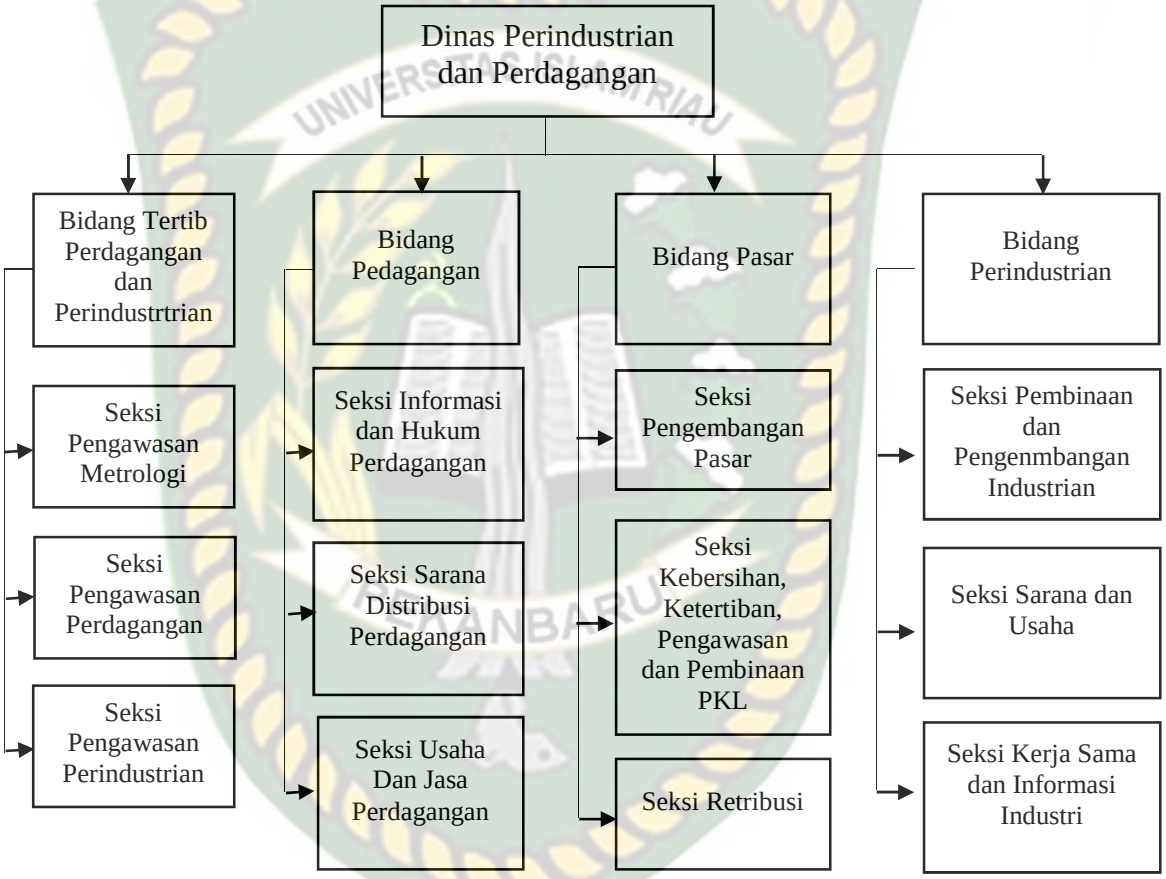

Sumber : Dinas Perindustian dan Pedaggangan Kota Pekanbaru

Dapat dilihat dari Gambar I.1 dimana di Dinas Perindustian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memiliki empat bidang, yakni Bidang Tertib Perdagangan Dan Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Perindustrian. Bidang Pasar merupakan salah satu dari empat bidang yang ada di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagai hasil dari proses pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Yang terlibat dalam pengawasan pada saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) yaitu : Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bidang Pasar. Dari ketiga instansi yang terlibat adapun yang melakukan pengawasan tersebut sudah ada tugasnya masing-masing. Untuk Satuan polisi pamong praja itu bertugas untuk menjaga keamanan, kepolisian juga bertugas untuk menjaga keamanan secara keseluruhan, Dinas Perhubungan bagian untuk mengatur jalan terutama jika ada acara-acara besar seperti senam mereka yang mengatur dan menertibkan jalan, sedangkan Bidang Pasar lebih berfokus dalam melakukan pengawasan untuk penertiban pedagang kaki lima pada saat berjualan dan dikawasan tertentu seperti kawasan dari samping Bank Indonesia ke Kantor Gubernur sampai kejalan Cut Nyak Dien. Pengawasan yang dilakukan Bidang Pasar ini yaitu untuk memantau pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu serta memberikan sanksi. Karena lapak yang disediakan oleh bidang pasar itu khusus untuk yang terdaftar saja.

Untuk luas tempat usaha bagi pedagang yang berjualan di area Car Free day juga sudah ditentukan dan dibatasi oleh bidang pasar idealnya yaitu 2 meter x 2 meter, hal ini dilakukan untuk meminimalisir agar pedagang yang lain juga mendapatkan kebagian tempat, namun jika pedagang merasa tidak cukup dengan jarak yang telah ditentukan, seperti pedagang berjualan makanan (lontong, sate,) otomatis luas tempat usaha yang dibutuhkan lebih dari 2 meter, maka pedagang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut jika setuju dengan ketetapan yang telah dibuat oleh Bidang Pasar dapat membayar retribusi yaitu 11.000 x permeter.

Berdasarakan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 196 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pada tupoksi bidang pasar poin 12 bahawasannya yang melakukan Pengoordinaian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi serta pelaksanaan pengawasan terhadap pedagang kaki lima adalah bidang pasar yang juga meliputi tiga seksi ; Seksi pengembangan pasar dan pengawasan, Seksi kebersihan, ketertiban, dan pembinaan pedagang kaki lima dan Seksi retribusi. Yang terlibat untuk melakukan pengawasan dan turun kelapangan adalah seluruh anggota yang ada dibidang pasar, namun untuk jadwalnya itu dibagi setiap minggunya secara bergilir. Kemudian dalam melakukan pengawasan masing-masing seksi yang bertugas pada hari tersebut dibagi menjadi dua tim dimana, masing-masing tim terdiri dari 15 orang, yaitu untuk minggu pertama itu dari seksi pengembangan pasar dan pengawasan, minggu selanjutnya Seksi kebersihan, ketertiban, dan pembinaan pedagang kaki lima dan seterusnya sampai ke seksi retribusi.

- **Tugas Pokok Bidang Pasar**

Bidang Pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar dan pedagang kaki lima.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- **Fungsi**

1. Pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusuann rencana kerja tahunan.
2. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian, serta pengembangan pasar
3. Pengoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalaisaan setiap data pasar yang ada
4. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar
5. Pengoordinasian serta oembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana- rencana pengembangan pasar
6. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar
7. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja
8. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan
9. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan dibidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait.
11. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar
12. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi serta pelaksanaan pengawasan terhadap pedagang kaki lima
13. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan kepala bagian tata usaha
14. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan buku registrasi data pedagang dan buku registrasi psar yang ada adi dalam lingkungan pasar.
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Bidang pasar terdiri dari :**

a. Seksi pengembangan pasar dan pengawasan
b. Seksi kebersihan, ketertiban, dan pembinaan pedagang kaki lima
c. Seksi retribusi

Adapun tata tertib yang harus dipatuhi Pedagang kaki lima areal Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) adalah sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Melakukan pendaftaran sebagai pedagang aral Car Free Day untuk mendapatkan tanda daftar usaha pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru
2. Bagi pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi hari bebas kendaraan bermotor agar menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor pukul 04.00 sampai dengan 09.00 WIB.
3. Membayar retribusi pelayanan pasar setiap kali berjualan pada areal hari bebas kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tidak ada pungutan apapun selain retribusi yang ditetapkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 196 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017
5. Bagi pedagang yang berjualan kuliner di larang menggunakan zat yang berbahaya, yang dilarang oleh pemerintah
6. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan
7. Dilarang berjualan diluar lokasi yang telah ditentukan oleh pemerinta Kota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
8. Mentaati segala aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah kota Pekanbaru dan bagi pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan/ tata tertib, maka haknya untuk berjualan di lokasi hari bebas kendaraan bermotor akan dicabut.

keuntungan bagi pedagang kaki lima yang memiliki kartu tanda daftar pedagang yaitu tempat mereka berjualan tidak bisa diganggu oleh pedagang yang tidak memiliki kartu, terdaftar secara resmi dan memiliki tempat tetap untuk berjualan yang telah di tentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terbebas dari berbagai bentuk penertiban. Sedangankan yang tidak terdaftar ataupun tidak memilki kartu tanda daftar pedagang tersebut untuk mencari lapak berjualan mereka menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, jika ada penertiban dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya Bidang Pasar mereka akan mengusir pedagang tersebut secara paksa karena lapak yang ditunggu bukan hak mereka. Untuk pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu tanda daftar pedagang 70% yang sudah terdaftar, yang belum daftar 10%, sedangkan pedagang yang tidak mau buat kartu tersebut 20%.

Pedagang yang belum terdaftar tersebut dikarenakan lapak untuk berjualan sudah penuh maka dimasukkan kedalam daftar tunggu tetapi mereka tetap berjualan tanpa adanya kartu tersebut, lapak yang sudah penuh tersebut kebanyakan memang di tempati oleh pedagang yang belum terdaftar sama sekali ke dinas, sedangkan pedagang yang tidak mau membuat kartu tersebut dikarenakan proses pembutan kartu tersebut memakan waktu yang cukup lama dan proses yang cukup rumit, informasi ini diketahui berdasarkan observasi yang peneliti temukan dilapangan penjelasan dari bebrapa pedagang yang berjualan (Minggu, 29 September 2019).

Untuk mengetahui apakah pedagang kaki lima yang berjualan di area Car Free Day sudah terdaftar secara legal atau resmi yaitu dilihat dari mereka yang menggunakan atau menggantungkan kartu tanda tanda daftar pedagang yang di cetak berbentuk name tag dengan ukuran 20 x 16 cm. Sehingga apabila dari Bidang Pasar melakukan pengawasan dan penertiban bisa langsung dikenali ataupun ditandai mana pedagang yang sudah ataupun yang belum memiliki kartu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanda daftar pedagang. Namun meskipun pedagang yang sudah punya kartu tersebut, pada saat berjualan masih ditemukan pedagang yang tidak memakai name tag yang telah didapatkan dari Bidang Pasar, hal ini dikarenakan ada yang saat berjualan lupa membawa name tag, dan ada juga pedagang yang memang tidak mau memakai name tag dari kartu tersebut dikarenakan ukuran dari kartu tersebut terlalu besar sehingga menganggu aktivitas pedagang kaki lima yang berjualan.

Tabel I. 1: Daftar Data Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day di Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	**Daftar Pedagang**	**Jumlah Pedagang**
1	Pedagang Kaki Lima yang mendaftar	500
2	Pedagang yang sudah punya kartu	350
3	Pedagang yang Belum Memperpanjang Kartu Tanda Daftar Pedagang	76
4	Daftar Tunggu / Pedagang yang belum Terdaftar (TDP)	150

Sumber: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan Tabel I. 1 dapat dilihat bahwa jumlah pedagang kaki lima yang mendaftar ke Bidang Pasar ada sekitar 500 pedagang, dikarena kan lokasi atau tempat yang telah ditentukan ataupun yang disediakan oleh Bidang Pasar terbatas maka jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di area Car free Day dibatasi yaitu ada 350 pedagang yang sudah memiliki kartu. Sedangkan yang belum punya kartu yaiu 150 pedagang, angka tersebut bisa saja berubah karena setiap minggunya jumlah pedagang kaki lima tersebut bisa bertambah dan bisa saja berkurang. Kartu Tanda Daftar Pedagang ini hanya berlaku setahun, apabila

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masa aktif kartu tesebut telah habis maka pedagang wajib memperpanjangnya, jika tidak maka lapak pedagang lama tesebut akan digantikan oleh pedagang yang baru.

Dari jumlah pedagang yang sudah resmi terdaftar, terdapat daftar tunggu atau pedagang yang belum terdaftar sekitar 150 pedagang, dari 150 tersebut ada yang memang tidak mau mendaftar dan ada juga yang ingin mendaftar namun dikarenakan lapak yang disediakan sudah tidak ada lagi maka pedagang mengambil inisiatif untuk mencari lapak sendiri.

Kemudian dari 350 pedagang kaki lima yang berjualan di area Car Free Day tersebut hanya 274 yang sudah memperpanjang kartu tanda daftar pedagang sedangkan masih ada 76 pedagang yang belum memperpanjang kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP), Berdasarkan observasi dilapangan peneliti mendapatkan informasi bahwasannya pedagang yang belum memperpanjang kartu dikarenakan malas untuk mengurusnya lagi, dan juga dikarena kan memiliki kesibukan jadi belum punya waktu untuk pergi ke Dinas Perindustrian Dan Perdagangan untuk memperpanjang kartu tersebut.

Guna memperpanjang kartu tersebut untuk mengetahui apakah pedagang yang berjualan masih tetap ingin berjualan atau tidak. Hal ini dikarenakan untuk memastikan agar pedagang yang belum terdaftar dan yang belum memilki tempat lokasi usaha berjualan bisa mengurus kartu tanda daftar pedagang, jika pedagang lama tidak memperpanjang kartu tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut tata cara pedagang kaki lima yang ingin memperpanjang kartu :

Tabel I. 2: Permohonan Perpanjangan kartu Tanda Daftar Pedagang

No	Uraian Survey	Surat Permohonan	Hasil Lapangan
1	**2**	**3**	**4**
1	Nama Pedagang Sesuai KTP	Fotocopy KTP	
2	Jenis Usaha :		
1	**2**	**3**	**4**
	a. Bergerak (No. Pol/ STNK)		
	b. Non Bergerak		
	c. Kuliner		
	d. Non Kuliner		
3	Luas Tempat usaha		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 2019

Dilihat dari Tabel I.2 bahawasannya pedagang mengisi surat permohonan perpanjangan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) untuk berjualan (berdagang) di areal Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) jalan Cut Nyak Dien. Kemudian pedagang melampirkan syarat- syarat dibawah ini :

1. Kartu Tanda Daftar Pedagang yang telah habis masa berlakunya (ASLI)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 2 lembar
3. Fotocopy Kartu Kleuarga P 2 lembar
4. Pasphoto warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar
5. Surat rekomendasi hasil survey lapangan dari Satuan Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Tabel I.3: Data Jumlah Pedagang Kaki Lima yang Sudah Memiliki dan yang Belum memiliki Kartu Tanda daftar Pedagang (TDP)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Daftar Pedagang	Jumlah Pedagang
1	Pedagang yang sudah memiliki kartu	350
2	Pedagang yang belum memiliki kartu	150

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bawa ada 350 pedagang yang sudah memiliki kartu. Dikarena kan masa berlaku kartu tersebut hanya satu tahun maka pedagang wajib melakukan perpanjangan kartu. Namun dari 350 pedagang yang sudah memiliki kartu tersebut, terdapat pula pedagang yang belum memperpanjang kartu yaitu ada 76 pedagang. Dilihat dari kondisi dilapangan bahwasannya setiap minggunya jumlah pedagang kaki lima semakin bertambah diluar dari 350 kuota yang telah ditentukan oleh bidang pasar. Dikarenakan adanya batasan yang ditentukan oleh bidang pasar untuk pedagang yang berjualan di area Car Free Day tersebut, maka pedagang yang berjualan tanpa memiliki kartu adalah 150 pedagang yang berstatus sebagai daftar tunggu.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru mewajibkan pedagang terlebih dahulu mencari lapak untuk berjualan kemudian melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP). Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan terkhususnya bidang pasar dimana Kartu Tanda Daftar Pedagang ini diterbit kan yaitu salah satu upaya untuk melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penataan pedagang kaki lima khususnya yang berada di area Car Free Day agar lebih tertata.

Untuk itu dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada Pasal 4 dijelaskan tentang perizinan (1) dalam menjalankan usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 peraturand daerah ini, harus mendapatkan izin penggunaaan tempat usaha dari kepala daerah. (2) izin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini diajukan dengan cara mendafarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah di penuhi, (3)persyaratan dan tata cara pendafataran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini diatur oleh pemerintah daerah, (4) izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun, (5)izin sebgaaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dapat di cabut apabila : a. pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin, b. tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima, c. pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga apabila pedagang telah memiliki kartu tanda daftar pedagang mereka harus menggunakan kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) tersebut sebagai tanda pengenal dan bukti bahwa mereka telah terdaftar sebagai pedagang tetap di area Car Free Day. Namun dari informasi yang diperoleh penulis dari salah satu informan dalam hal ini yaitu petugas Mini market hamdalah, dimana beliau mengatakan bahwa kartu Tanda Daftar Pedagang bisa dikatakan hanya sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

formalitas, karena sampai sejauh ini pedagang kaki lima yang berjualan di area Car Free Day tersebut kebanyakan memang tidak memliki kartu Tanda Daftar Pedagang.

Padahal kartu Tanda Daftar Pedagang tersebut sangat penting bagi pedagang kaki lima yang berjualan yaitu sebagai identitas mereka pada saat berjualan dan terbebas dari segala bentuk penertiban dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 30 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pasat Pusat, dan Toko Swalayan pada Pasal 18 menjelaskan tentang Surat Tanda Pengenal Pedagang (STPP) dimana dalam Pasal 18 ini menegaskan bahwa pedagang wajib memiliki kartu dan mendapatkan izin, dan terdaftar sebagai pedagang. Kemudian Pemerintah mendelegasikan wewenang kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya Bidang Pasar, maka dari itu kartu Tanda Pengenal Pedagang penyebutannya disederhanakan oleh Bidang Pasar Sendiri menjadi Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) yang merujuk pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016

Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) berlaku sejak tahun 2015. Adapun Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) tersebut diketahui tidak berlaku seumur hidup sifatnya hanya sementara, dan hanya berlaku selama satu tahun, hal ini dikarenakan agar pedagang kaki lima yang lain mempunyai kesempatan untuk bisa berjualan di area Car Free Day tersebut, terkhusunya pedagang kaki lima yang baru dapat menggantikan posisi pedagang kaki lima yang sudah tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berjualan ataupun yang tidak ingin berjualan lagi serta pedagang kaki lima yang tidak memperpanjang kartu Tanda Daftar Pedagang tersebut maka pedagang yang lain bisa mengganti posisi tempat mereka yang berjualan sebelumnya.

Setiap minggunya di area Car free Day dimana jumlah pedagang kaki lima yang berjualan semakin bertambah. Bahkan masih banyak terdapat pedagang kaki lima yang berjualan diarea Car Free Day tersebut tidak memiliki kartu Tanda Daftar Pedagang dan pedagang kaki lima tesebut sebenarnya tidak dibenarkan berjualan diarea Car Free Day tersebut. Namun di karena kan masih belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyebabkan pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu Tanda Daftar Pedagang menjadi semena- mena dan berjualan tanpa ada memiliki kartu Tanda Daftar Pedagang, hal ini menjadi tidak adil bagi pedagang yang sudah mendaftar dan memiliki kartu Tanda Daftar Pedagang tetapi sering tidak mendapatkan posisi atau lokasi untuk berjualan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pertauran Perundang-undangan dibidang perdagangan mengaharuskan adanya harmonisasi ketentuan dibidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globaliasi pada masa kini dan masa depan. Seharusnya bagian bidang pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu melakukan pengawasan rutin guna meminimalisir terdapatnya pedagang yang tidak memiliki kartu Tanda Daftar Pedagang sebagai identitasnya. Selain itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengawasan juga perlu dilakukan agar pedagang semakin tertib dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan ketika berjualan di area Car Free Day tersebut. Dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Untuk pengawasan yang dilakukan khususnya Bidang Pasar yaitu sebanyak 20 orang turun kelapangan dan ini dilakukan setiap minggunya, informasi ini di dapatkan dari Koordinator lapangan satuan tugas.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis menemukan fenomena yang terjadi pada pengawasan dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang (TDP) Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kota Pekanbaru,yang ditemukan oleh penulis yaitu :

1. Fakta yang didapatkan oleh peneliti dilapangan bahawasannya Sampai saat ini dari 350 pedagang kaki lima yang berjualan di area Car Free Day Pekanbaru masih ada 76 pedagang kaki lima yang berjualan yang belum memperpanjang kartu tanda pedagang (TDP)
2. Berdasarkan fakta di lapangan peneliti menemukan terdapat 150 pedagang kaki lima yang berjualan Car Free Day atau di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang belum memiliki kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP).
3. Banyak Pedagang yang tidak memakai name tag Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) pada saat berjualan di area Car Free Day.
4. Dinilai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih belum optimal , hal ini dilihat dari masih terdapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pedagang kaki lima yang berjualan di Area Car Free Day yang tidak memiliki kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP).

Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan mengambil judul : "**Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat batasan pada rumusan masalah yang berfokus pada pengurusan kartu tanda daftar pedagang (TDP) dalam penelitian ini, yaitu "Bagaimana Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui faktor penyebab 76 pedagang kaki lima belum memperpanjang kartu tanda daftar pedagang
b. Untuk mengetahui penyebab pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu tanda daftar pedagang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap kepemilikan kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) pedagang kaki lima Area Car Free Day Pekanbaru ?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. **Kegunaan Teoritis**, yaitu peneliti ini dharapkan mampu untuk mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi, khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik dengan konsentrasi kajian ilmu yaitu Kebijakan Publik.

b. **Kegunaan Praktis,** Sebagai bahan masukkan bagi peneliti dan pembaca, umumnya tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Pekanbaru"

c. **Kegunaan Akademis,** Sebagai bahan masukkan bagi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengawasan pengurusan kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) di area Car Free Day Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan peneliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian serta akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penulisan ini.

1. Konsep Administrasi

Istilah administrasi berhubungan erat dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang dalam menjalankan kegiatan dan rutinitas kehidupan sehari-hari. Kegiatan administrasi yang teratur dan sistematis akan melahirkan keadaan organisasi yang sehat dan dinamis.

Sebagaimana yang dikemukakan Siagian (2010 : 4) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan keputusan keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya . Sedangkan administrasi dipandang dalam arti sempit dapat dicermati dari defenisi berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat – menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya jadi administrasi adalah serangkaian kegiataan ketatausahaan atau kesekretariatan berupa surat – menyurat dan pengelolaan data atau kketerangan tertulis lainya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya . (Zulkifli. 2005 ;16).

defenisi tentang administrasi menurut para ahli Pada umumnya masih sangat banyak sehingga tidak perlu lagi penulis sajikan satu per satu, karena pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu antara lain :

a. Adanya kerja sama
b. Banyak orang
c. Untuk mencapai tujuan bersama

Pengertian di atas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari,yaitu tata usaha. Kembali pada persoalan semula, bahwa yang penting kita ketahui adalah begitu luasnya administrasi karena menyangkut segala proses kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Administrasi secara umum adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan – keputusan yang telah di ambil dan di selenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Sondang P Siagian (dalam Syafiie 2010;14) admisnistrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan- keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hadari Nawawi (dalam Syafiie 2010: 14) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Siagian (2008;2) Administrasi didefenisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kesimpulannya Administrasi merupakan rangkaian kegiatan sekelompok orang yang saling bekerjasama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efesien.

2. Konsep Organisasi

Sebagaimana dikemukakakan siagian (2008 ; 6) organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat , seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang diseebut bawahan .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Organizing dari kata organize yang bermakna menciptakan sruktur dengan bagan-bagan yang saling berintegrasi sedemeikian rupa, sehingga hubungannya satu dengan yang lain saling terikat secara keseluruhan. Organisasi di artikan pula sebagai penggambaran pola dan bagan yang menujukkan garis-garis pemerintahan, kedudukan karyawan, serta hubungan-hubungan yang ada. Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan.

Menurut Manulang (dalam Hasibuan 2002 : 24), organisasi dalam arti yang dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan penetapan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antar unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan bersama.

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan dan sebagai wadah (tempat) terlaksananya administrasi. Sebagaimana defenisi yang diterangkan oleh Mooney (dalam Syafi'ie 2003 :113)

Menurut griffin (dalam Saefullah 2005: 4) Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Administrasi dan Organisasi merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan atau bisa dikatakan tidak dapat dipisahkan. Kegiatan Administrasi mengarah kepada pencapaian tujuan Organisasi yang efektif dan efisien, dan Organisasi sebagai wadah atau sarana untuk mencapai tujuan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagai alat administrasi dan manajemen , organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang . pertama organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti dikemukakan siagian (2003 ; 96) organisasi adalah tempat dimana kegiataan – kegiataan administrasi dan manajemen dijalankan , sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang – orang didalam organisasi itu.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa organisasi merupakan sistem yang terpadu, yang didalamnya terdapat subsistem dan komponen-komponen yang saling berhubungan. Setiap hubungan yang terjadi merupakan kerja sama di antara subsistem yang ada, sehingga ada saling ketergantungan yang kuat secara internal dan hubungan yang terpadu secara eksternal. Hubungan eksternal itu merupakan bagian dari kenyataan organisasi yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan elemen lainnya yang mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Dari perspektif administrasi dan manajemen setiap organisasi selalu ada seseorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan sejumlah orang yang bekerja sama dengan segala aktivitas dan fasilitasnya. Orang yang bertanggungjawab tersebut harus mengoordinasikan aneka kegiatan dan sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan berbeda. Berbagai kepentingan anggota organisasi yang berbeda dipadukan dan disamakan persepsinya melalui kesepakatan dalam berorganisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Konsep Manajemen

Pengertian Manajemen dalam Novitasari (2017 : 14)

a. **Stoner** "Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

b. **S.kimbsll dan D. S. Kimball** " mendefenisikan Manajemen adalah semua tugas dan fungsi, perencanaan, pembiayaan, kebijaksanaan, penyediaan alat dan penetapan struktur organisasi beserta *staffing.*

c. **Terry** " manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan *planning, organizing, actuating, dan controllin.*

Secara klasik, manajemen adalah ilmu atau seni tentang bagaimana menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Novitasari, 2017:14)

Manajemen adalah pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan bersama-sama orang lain. Jadi manajemen tidak akan ada tanpa adanya kerjasama dan yang melakukan kerja sama adalah manusia. Justru itu manajemen tergantung pada manusianya kalau manusianya yang baik, baiklah manajemen itu, tetapi sebaliknya kalau manusianya buruk maka buruklah juga manajemen itu (Zulkifli, 2015:14)

Manajemen merupakan suatu ilmu atau seni,mengapa disebut demikian,sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Manajemen juga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan sebagai suatu ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari sejak lama dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori (Zulkifli, 2015:5)

Sedangkan manajemen sebagai suatu seni, disini memandang bahawa dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerjasama dengan orang lain, nah bagai mana cara memerintahkan pada orang lain agar mau bekerja sama. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah *managing* (mengatur), maka dari itu untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana agar orang lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Hubungan antara administrasi , organisasi dan menajemen adalah adminstrasi keseluruhan proses kerjasama dua orang atau lebih didasarkan pada rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, organisasi adalah wadahnya, dan manajemen adalah ilmu atau seni atau cara untuk mengendalikan atau mengelola proses kerja sama tersebut demi pencapaian tujuan suatu kelompok yang sudah bekerjasama tadi jika unsur itu terpenuhi dengan baik pencapaian tujuan akan berhasil sesuai target.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli 2009: 17) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dalam menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Manajeman adalah sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Manullang (Dalam Zulkifli 2015: 4)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Manajeman adalah cara mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. Georgy R. Terry (Dalam Zulkifli 2015: 5)

Manajemen dalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi (Siswanto 2016 : 7).

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah mengatur atau mempekerjakan seorang sesuai dengan potensi dirinya, sehingga tidak tidak ada keterpaksaan dimanfaatkan potensi dirinya.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Penitngnya unsur manuisa sebagai sumber daya yang cukup potensial yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengemangan dirinya,karena itulah manusia juga perlu dimanajemenkan.

Menurut Mangkunegara (2011;10) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Stoner (dalam Rusby 2017: 2), Manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi yang memerlukannya.

Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, di samping itu efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen manusia. Manajemen SDM adalah bagian dari manajemen, karena teori-teori manajemen umum menjadi dasar pembahasnnya. Manajemen SDM mempunyai kekhususan dibandingkan dengan manajemen secara umum, karena yang di *"manage"* adalah manusia, sehingga keberhasilan atau kegagalan manajemen SDM ini mempunyai dampak yang sangat luas. Rachmawati (2008: 3) memberikan definisi manajemen SDM sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. SDM tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang berkesinambungan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengembanagan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengintergerasian sumber daya manusia terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi.

5. Konsep Kebijakan Publik

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (Dalam Agustino 2008: 6) kebijakan publik adalah keputusan tepat yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitis) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Richard Rose (Dalam Agustino 2008: 7) mengemukakan pengartian kebijakan publik adalah sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Carl Friedrich (Dalam Agustino 2008: 7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok, dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu diamana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dimana kebijakan itu diusukan agar dapat berguna dalam mengatasianya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Dye (Dalam Agustino 2008 : 7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk di kerjakan atau tidak dikerjakan.

Jemes Anderson (Dalam Agustino 2008: 7) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang diikuti dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut winarno (2002 : 14) mengatakan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat , suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu,

Dapat disimpulkan kebijakan publik adalah keseluruhan aturan atau keputusan yang dibuat oleh aparatur pemerintah ataupun itu pejabat negara yang bertujuan untuk mengarur kerukunan masyarakat demi terselesainya permasalahan yang ada ditengah masyarakat.

6. Konsep Pengawasan

Dalam setiap kegiatan organisasi pengawasan begitu penting untuk dilakukan mengingat bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen guna menjamin setiap kegiatan yang telah direncanakan akan terlaksana dengan baik.

Menurut Robert J. Mockler (1972 :2) dalam Zulkifli (2015;255) Pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menetukan dan mengukur deviasi- deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bentuk bentuk pengawasan :

1. Pengawasan Pendahuluan *(Feedforward Control, Strerring Control)*

   Dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standard dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Pengawasan ini akan efektif bila manajer dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan.
2. Pengawasan *Concurent (Concurrent Control),* Yaitu pengawasan "ya-tidak" dimana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelumkegiatan dilakukan guna menjamin ketetapan pelaksanaan kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik *(Feedback Control, Past- Action Control),* Yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

   Tahap Proses Pengawasan menurut Robert J. Mockler dalam Zulkifli (2015;256)

1. Menetapkan standard an metode untuk pengukuran kinerja
2. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar
3. Mengambil tindakan perbaikan

Pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkn kepastian mencapai menurut hasil yang direncanakan. Terry (dalam Zulkifli, 2005;122).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Terry (dalam Fahmi 2012 : 84) Pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan renacan yaitu selaras dengan standar.

Siagian (2003 : 112) pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Terry (2008 : 10) Pengawasan adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan- tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif.

Handoko (2009 : 359) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk “menjamin” bahwa tujuan dari organisasi dan manjemen tercapai.

Menurut Handoko (2009 : 363) tiga standar yang umum digunakan dalam tahapan proses pengawasan adalah :

1. Standar- standar moneter, yang ditunjukan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan.
2. Standar- standar fisik, mungkin meliputi kualitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.
3. Standar- standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas suatu pekerjaan harus diselesaikan.

Menurut Mokler (dalam Siswanto, 2013 ; 139) pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaa, mendesain system umpan balik informasi, membandingkan kinerja standar yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

telah ditetapkan dengan kinerja actual, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mngukur signifikan penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efektif dan efisien guna mencapai sasaran perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pengawasan memiliki kosenkuensi membandingkan antara rencana yang telah disusun dengan hasil yang diraih oleh organisasi tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

7. **Konsep Kartu Tanda Daftar Pedagang,** merupakan kartu yang digunakan pedagang kaki lima sebagai identitas pada saat berdagang di area Car Free Day kota Pekanbaru.
8. **Konsep Pedagang Kaki Limaa,** pedagang yang mempunyai volume dan modal kecil, tidak permanent (bisa diangkat dan dipisah tempatkan), mempunyai lokasi yang tidak tetap dan bisa digelar dimana saja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir peneliti dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar II. 1 Kerangka Pikir Tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Pekanbaru

Sumber : Olahan Penulis 2020

C. Hipotesis

Berdasarkan fenomena dan rumusan masalah tersebut, maka peneliti mengemukakan hipotesis sementara, yaitu : Diduga pengawasan yang dilakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang (TDP) studi kasus pedagang kaki lima di area *Car Free Day* Kota Pekanbaru belum optimal.

D. Konsep Operasional

1. Administarsi, merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bers ama yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Organisasi, merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat , seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang diseebut bawahan .
3. Manajemen, merupakan cara mengatur atau mempekerjakan seseorang sesuai dengan potensi dirinya, sehingga tidak tidak ada keterpaksaan dimanfaatkan potensi dirinya.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia, merupakan suatu proses yang berkesinambungan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengembanagan, pengintergerasian sumber daya manusia terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi.
5. Kebijakan Publik, merupakan keseluruhan aturan atau keputusan yang dibuat oleh aparatur pemerintah ataupun itu pejabat negara yang bertujuan untuk mengatur kerukunan masyarakat demi terselesainya permasalahan yang ada ditengah masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Pengawasan, proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan renacan yaitu selaras dengan standar.
7. Menetapkan standar yaitu merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas, harapan dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi dan program kerja yang sudah ditetapkan direalisasikan seluruhnya antara harapan yang direncanakan dan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaaan dapat tercapai. Menetaokan standar juga merupakan tahap awal dalam pengawasan adalah menetapkan standar pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pengururs an kartu tanda daftar pedagang.
8. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar, yakni pengawasan yang dilakukan oleh dinas prindustrian dan perdagangan dengan cara pemeriksaan rutin, sidak, laporan
9. Mengambil tindakan perbaikan yaitu manakala ditemukan pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu tanda pedagang atau izin untuk berjualan di area Car Free Day perlu diamil tindakan berupa sanksi bagi yang tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.
10. Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP), merupakan kartu izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha dagang yang digunakan pedagang kaki lima sebagai identitas pada saat berjualan di Area Car Free Day kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

11. Pedagang Kaki Lima yaitu pedagang yang mempunyai volume dan modal kecil, tidak permanent (bisa diangkat dan dipisah tempatkan), mempunyai lokasi yang tidak tetap dan bisa digelar dimana saja.

E. Operasional Variabel

Tabel II. 1: Operasionalisasi Variabel Tentang Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengurusan Kartu Tanda Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru

Konsep	Variable	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Menurut Robert J. Mockler (1972 : 2) dalam Zulkifli (2015: 255) Pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perancangan,merancang system informasi umpan	Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP)	1. Menetapakan standar	a). Adanya izin usaha perdagangan b). Ketentuan aturan c). Mengumpulkan data terkait izin usaha perdagangan	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, Menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien		2. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar	a). jelasnya tugas dalam menjalankan peraturan b). jelasnya wewenang dalam menjalankan peraturan c). jelasnya tanggung jawab dalam menjalin peraturan	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
1	**2**	**3**	**4**	**5**
		3. Mengambil tindakan perbaikan	a).melaksanakan pengarahan peraturan terhadap pedagang kaki lima b). melakukan pengawasan c). memberikan sanki yang melanggar peraruran	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana

Sumber : Olahan Penulis,2019

Berdasarkan operasional variable diatas dapat dijelaskan bahwa dari konsep pengawasan yang berangkat dari kerangka pikir diatas, maka terdapat variable bidang pengawasan. Terdapat beberapa indicator yang penulis bahas yang sesuai dengan kajian penelitian yang diteliti dalam pelaksanaan pengawasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diantaranya menetapkan standar, membandingkan kinerja sesuai dengan standar, an mengambil tindakan perbaikan.

F. Teknik Pengukuran

Adapun untuk melihat upaya yang dilakukan dengan melihat Pengawaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengururs an Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru, dalam penelitian ini untuk pengukuran dari masing- masing indikator dalam pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) dilakukan dengan menggunakan teori *Skala Likert*.

Menurut Sugyiono (2016: 93) Skala Likert adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang terjadi dilokasi penelitian. Berdasarkan teori tersebut maka dapat diketahui bahwa ditetapkan ukuran : Terlaksana, Cukup Terlaksana, Kurang Terlaksana terhadap seluruh indikator yang ada, dengan penilaian sebagai berikut : Pengawaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengururs an Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru dikategorikan :

Tabel II. 2: Pengukuran Skala Likert

Options	Bobot
Terlaksana	3
Cukup Terlaksana	2
Kurang Terlaksana	1

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Rumus :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Skor Maksimal : Bobot skor tertinggi x jumlah item yang diniliai (pertanyaan) x jumlah responden (20 orang)

Skor Minimal : Bobot skor terendah x jumlah item yang diniliai (pertanyaan) x jumlah responden (20 orang)

Melalui rumus tersebut, maka di peroleh Skor Maksimal yaitu 3x9x20 =540, sedangkan Skor Minimal yaitu 1x9x20 = 180, sehingga Interval Skor untuk seluruh pertanyaan ada;ah sebaagi berikut :

$$Interval = \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilian}}$$

$$= \frac{540 - 180}{3}$$

$$= 120$$

Berdasarkan rumus diatas, maka di peroleh pengkategorian interval skor sebagai berikut :

Terlaksana :

Apabila penilaian terhadap indicator pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang (TDP) 421 - 540

Cukup Terlaksana :

Apabila penilaian terhadap indicator pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang (TDP) 301 - 420

Kurang Terlaksana :

Apabila penilaian terhadap indikator pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang (TDP) 180 - 300

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun pengukuran dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar

   Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 Pertanyaan untuk responden dengan skor tertinggi 180 dan skor terendahnya 60 dengan kelas interval 40 dan dinyatakan sebagai berikut:

Terlaksana :

Apabila penilaian tehadap indicator penetapan standar berada pada skala 141 – 180

Cukup Terlaksana :

Apabila penilaian tehadap indicator penetapan standar berada pada skala 101 – 140

Kurang Terlaksana :

Apabila penilaian tehadap indicator penetapan standar berada pada skala - 60 - 100

2. Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar

   Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 Pertanyaan untuk responden dengan skor tertinggi 180 dan skor terendahnya 60 dengan kelas interval 40 dan dinyatakan sebagai berikut:

Terlaksana :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Apabila penilaian tehadap indikator membandingkan kinerja sesuai dengan standar berada pada skala 141 – 180

Cukup Terlaksana :

Apabila penilaian tehadap indikator membandingkan kinerja sesuai dengan standar berada pada skala 101 – 140

Kurang Terlaksana :

Apabila penilaian tehadap indikator membandingkan kinerja sesuai dengan standar berada pada skala 60 -100

3. Mengambil Tindakan Perbaikan

Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 Pertanyaan untuk responden dengan skor tertinggi 180 dan skor terendahnya 60 dengan kelas interval 40 dan dinyatakan sebagai berikut:

Terlaksana :

Apabila penilaian tehadap indikator mengambil tindakan perbaikan berada pada skala 141 - 180

Cukup Terlaksana :

Apabila penilaian tehadap indikator Mengambil Tindakan Perbaikan dengan standar berada pada skala 101 - 140

Kurang Terlaksana :

Apabila penilaian tehadap indicator Mengambil Tindakan Perbaikan berada pada skala 60 - 100

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

G. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 3: Penelitian Terdahulu Tentang Pengawasan Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang

No	Tahun	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	2016	Nora Oktavia	Pengawasan Izin Pergudangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pekanaru	Pengawasan	Kualitatif
2	2016	Lusiana Monica	Pengawasan Tanda Daftar Perusahaan Finance di Kota Pekanabru	Pengawasan	kuantitatif
3	2015	Dicky	Pengawasan Dinas		

		Taufik Riyadi	Perindustrian dan Perdagangan dalam Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Kota Pekanbaru Tahun 2014 – 2015	Pengawasan	Kualitatif

1	2	3	4	5	6
5	2017	Dian Azhari	Pengawasan Pedagang Kaki Lima pada Pasar Atas dan Pasar Bawah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi	Pengawasan	Kualitatif
4	2018	Rio Chandra	Pengawasan Perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) Pergudangan Kota Pekanbaru Tahun 2014 - 2016	Pengawasan	Kualitatif

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel penelitian terdahulu yang penulis peroleh melalui jurnal dan skripsi, dapat dipaparkan beberapa hal yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, adapun perbedaan tersebut yaitu :

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif sementara penelitian yang sedang dilakukan sekarang menggunakan metode penelitian kuantitatif
2. Penulis menggunakan teori yang berbeda dari penelitian terdahulu
3. Pada objek penelitian yang sedang penulis lakukan juga berbeda dengan objek penelitian terdahulu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Karena penulis ingin mendapatakan data yang akurat, berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Sedangkan tipe penelitian dalam Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) Kota Pekanbaru menggunakan survey deskriptif, yaitu penelitian yang mengambarkan fenomena dan kejadian yang berlangsung dilapangan pada saat tertentu.

Menurut (Sugiyono (2014 : 11) Metode Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Karena untuk mempermudah penulis mendapatkan informasi dan data.

Metode Kuantittaif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data yang akurat berupa angka sebagai alat yang digunakan untuk menganalisis keterangan apa yang ingin diketahui. Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang digunakan yaitu data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative. (Sugiyono, 2014 : 11)

Sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara qusioner, wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Data dan informasi yang diperoleh di jadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam Pengurusan Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang kaki lima Area Car Free Day) Pekanbaru

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penulis mengambil penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pedagang kaki lima di Area Car Free Day. Adapun pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan fenomena yang ada beserta pengamatan penulis dilapangan mengenai Pengurusan kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) yaitu Pedagang kaki lima Area Car Free Day Kota Pekanbaru dikarenakan perlunya pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan khusunya Bidang Pasar terhadap pedagang kaki lima dalam kepemilikan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) saat berjualan di Area Car Free Day tersebut agar lebih tertata, lebih tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun jika dilihat dari fenomena yang terjadi dilapangan, dimana masih terdapat pedagang kaki lima yang belum memiliki kartu tanda daftar pedagang bahkan ada yang sudah mendaftar namun belum mengambil kartu tersebut. Artinya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mengenai Pengurusan kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) dinilai masih belum optimal seperti yang diharapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan di teliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemuka kan Sugiyono (2016 : 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru, serta pelaku usaha yaitu pedagang kaki lima area Car Free Day Pekanbaru.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016 ; 81) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah di pelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).

Jadi sampel merupakan suatu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang kita lakukan. Sampel penelitian mencerminkan dan menentukan seberapa jauh sampel tersebut bermanfaat dalam membuat kesimpulan penelitian. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan Rumus Slovin

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel populasi dan sampel penelitian dibawah ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III. 1: Tabel Populasi dan Sampel Penelitian pada Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima area Car Free Day) Pekanbaru.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Bidang Pasar	1	1	100 %
2	Seksi kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	1	1	100 %
3	Seksi Retribusi	1	1	100 %
4	Koordinator Lapangan Satuan Tugas	2	2	100 %
5	Pedagang yang sudah memiliki kartu tanda daftar pedagang	350	10	2,8 %
6	Pedagang yang belum memiliki kartu tanda daftar pedagang	150	10	6,6 %
	Jumlah	505	25	4,9 %

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dilakukan *Teknik Sensus* dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasinya sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2016 :85) sampling sensus/ jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel jumlah populasinya relative kecil kurang dari 30 orang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Untuk pedagang kaki lima yang berjualan diarea Car Free Day digunakan teknik penarikan sampel *Randowm Sampling* pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut Sugiyono (2016 : 82)

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini maka perlu diketahui sumber data dalam mempe roleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan hasil penelitian dilapangan, yaitu data dari hasil wawancara dan hasil data yang diperoleh langsung dari responden dilokasi peneliti yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti.

Data tentang bagaimana Informasi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Pekanbaru”

2. Data Sekunder

Data skunder sebagai data yang memperkuat penelitian ini yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian.

Nasir (2003 ;328) dalam Riduwan 2014 ; 72) mengatakan baha teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, infoormasi lisan dan beragam fakta yang berpengaruh dengan focus penelitian yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui hasil pengamatan mengenai Pengawasan Dinas Prindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Pekanbaru.

Hadi (dalam Sugiyono 2016 : 145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu kompleks yang tersususn dari berbagai proses biologis dan psikologis.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung ,melakukan dialog atau percakapan kepada responden berdasarkan tujuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyelidikan untuk memperoleh data secara langsung dari responden terkait dengan penelitian ini.

Menurut (Sudaryono, 2016;82) wawancara adalah suatu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan Dallam penelitian deskriptif dan deskriptif kuantitatif,

3. Kusioner / Angket

Menurut (Noor, 210;139) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaaan kepada responden dengan harapaan memberikan respon atas daftar ppertanyaan tersebut.

kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan tertulis yang akan diberikan kepada responden penelitian untuk diisi oleh responden kemudian dikembalikan kepada peneliti, yang menyangkut tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda daftar Pedagang (TDP) (studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Pekanbaru

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data yang berbentuk dokumen yang berisikan data penting, baik itu berbentuk teoritis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ataupun data konkrit yang terdapat dilapangan dapat digunakan dan sangat diperlukan guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

Menurut (Noor, 210;141) dokumen merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, lapran, dan foto.

G. Teknik Analisis data

Setelah data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan dan di olah menurut jenisnya setelah itu di analisis secara deskriptif.

menurut Sugiyono (2013 : 244) yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta- fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

H. Jadwal Kegiatan Peneliti

Tabel III.2: Jadwal waktu kegiatan peneliti tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Pekanbaru

No	JenisKegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Juni				Juli				Agutus				Septembe r				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up																								
2	Seminar Up																								
3	Revisi Up																								
4	RevisiKuisoner																								
5	Rekomedasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	UjianSkripsi																								
11	RevisiSkripsi																								
12	PenggandaanSkripsi																								

Sumber : OlahanPenulis, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang memiliki luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak diantara 0º 25' – 0º 45' Lintang Utara dan 101º 14' – 101º 34' Bujur Timur. Denagn batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Dibagian Utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Pelalawan dan kabupaten Kampar
- Sedangkan di bagian barat berbataan dengan kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 km² menajadi ± 446, 50 km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan / Desa. Dari hasil pengukuran / pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632, 26 km². Meningkatnya kegiatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertb pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dientuklah kecamatan baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan diantaranya : Tampan, Bukit raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Sukajadi, Payung Sekaki, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, Rumbai, dan Kelurahan / Desa dengan Peraturan Daerah 2003 menjadi 58 Kelurahan / Deasa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai seperti : Air Hitam, Sungai Umban Sari, Setukul, Siban, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman kekota serta daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34, 1 derajat celcius sampai dengan 35, 6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20, 2 derajat celcius sampai dengan 23, 0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435, 0 mm/ tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan januari sampai dengan April dan September sampai dengan Desember
- Musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan Agustus. (Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas ini di pimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru beralamat di jalan Teratai No, 83, Telp, (0761) 21669, 25174 Fax (0761) 25174 Pekanbaru 28127.

Perkembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

a. Tahun 1991

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebelumnya bernama kantor departemen Perindustrian dan Perdagangan kotamadya pekanbaru.

b. Tahun 2001

Berdasarkan UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 melalui Peraturan Daerah (PERDA) No 07 Tahun 2001 Pemerintah daerah Kota Pekanbaru Mmebentuk Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Adapun yang pernah menjabat sebagai kepala Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. H. Amir Husein
2. Drs. H. Kustalani Rahman, M.Si
3. H. Suraji, SH
4. Ir. Hj. El Syabrina MP
5. Drs. Igot Ahmad Hutasuhut (yang saat ini menjabat)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Gambar IV. 1: Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

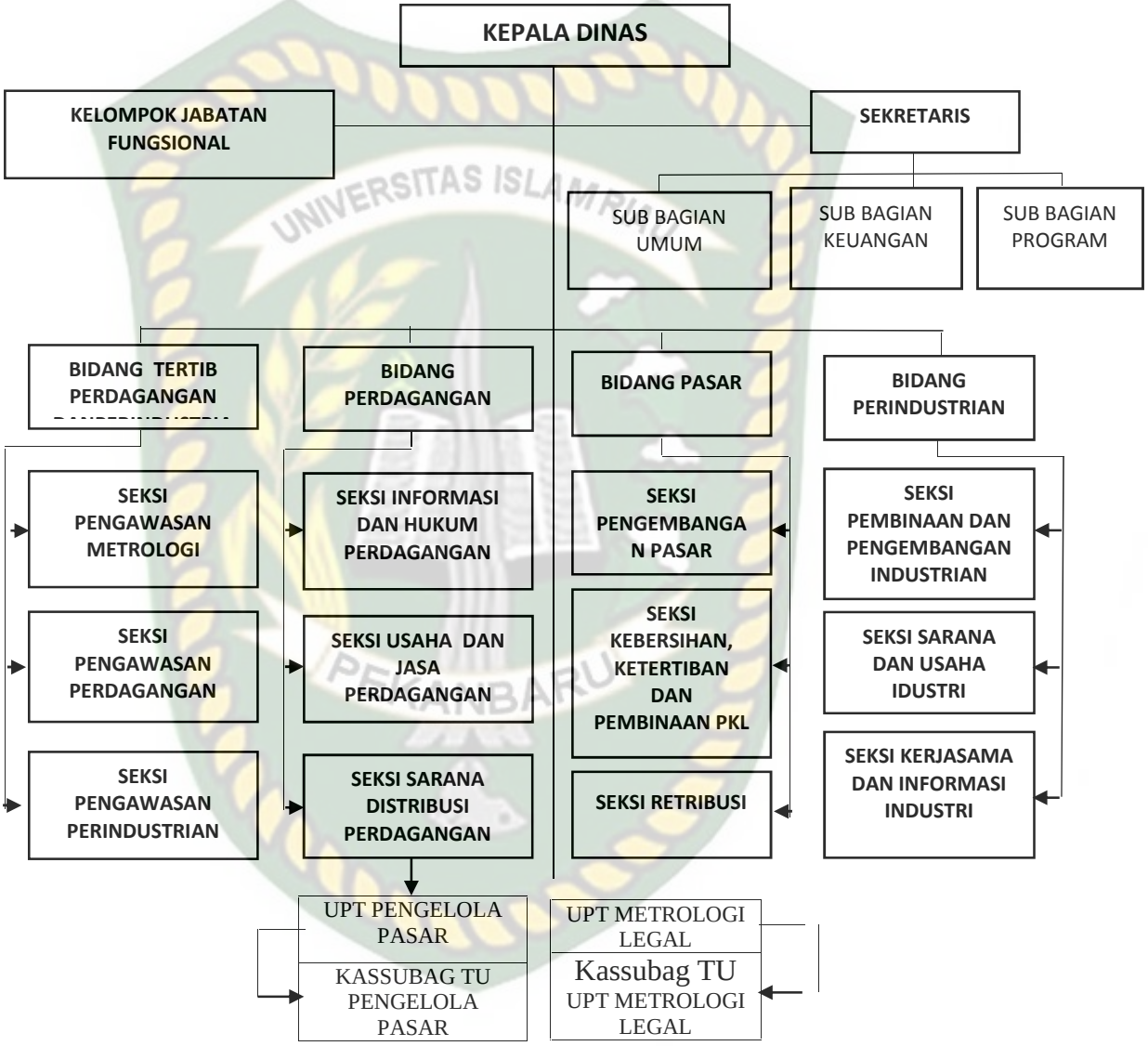

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

1. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

2. Fungsi

Perumusan kebijakan teknis dibidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah merumuskan suatu kebijakan teknis yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum pada bidang perindustrian dan perdagangan
2. merumusan kebijakan, pelaksanaan teknis dan penyusunan, serta pemberian bimbingan dan penyuluhan pada bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Penyelenggaraan kebijakan umum dan pelayanan teknis pada bidang perdagangan dan perindustrian
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian, pembinaan pegawai dilingkungan dinas perindustrian dan perdagangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan perubahan terhadap susunan organisasi, kedudukan dan tugas- tugas pokok hingga saat ini

E. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Visi

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna untuk menunjang ekonomi kerakyatan"

2. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Menciptakan industry yang kondusif dan distribusi barang yang merata
2. Menumbuhkembangkan perdagangan dan industry yang berwawasan lingkungan
3. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas profesionalisme dibidang perdagangan dan industri
4. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab
5. Menyediakan informasi perdagangan dan industry yang akurat
6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar serta perlindungan konsumen

Dalam susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terdapat tugas pokok dan fungsi dari masing masing bagian yaitu :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan serta tugas pembantu lainnya berdasarkan Azas Otonomi Daerah.

Fungsi

1. merumusan kebijakan teknis dan pelaksana pada bidang perindustrian dan perdagangan
2. merumusan kebijakan teknis pembinaan serta melakukan pelaksanaan tugas dibidang industri dan perdagangan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekertaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

b. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanaan pengelolaan administrasi, penatausahaan, urusan kepegawaian, umum/ perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.

Sekertariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyuusanan perencanaan, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tat usaha

b. Pengelolaan administrasi keuangan

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan perlengkapan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan pelaksanaan rapat dinas dan upacara serta keprotokolan

Secretariat terdiri dari 3 sub bagian diantaranya :

1. Sub bagian umum
2. Sub bagian keuangan
3. Sub bagian program

Tiap- tiap sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.

1) Sub bagian umum

Tugas Pokok

Sub bagian umum mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan program kerja sub bagian umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Fungsi

1. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlenkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang undangan yang berlaku
2. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dn informasi sub bagia umum
3. Pelaksanaan urusan kepertokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat
4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas
6. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuha dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemiliharaan barang milik daerah
7. Pengurusan penggunan dan pemiliharaan varang milik daerah
8. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruang dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkup dinas
9. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok

Sub bagian keuangan mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan program kerja sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi

1. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan asset berdasarkn ketentuan peraturan perundang-undangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran
3. Penyiapan surat perintah membayar
4. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan
5. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
6. Pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas
7. Penatausahaan asset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Penyimpanan sokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tnah dan/ atau bangunan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Sub Bagian Program

Tugas Pokok

Sub Bagian Program memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja sub bagian program berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi

1. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran perusahaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pendaftaran perusahaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Perencanaan, mengatur dan mengawasai terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha export import dan teknis pembinaan sarana dan prasarana usaha perdagangan, pengelolaan izin usaha perdagangan.
3. Perencanaan, mengatur dan mengawasai terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen
4. Pengoodinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu
5. Pengoodinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha
6. Pengoodinasian, pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagnagan mempunyai tugas membantu sebgagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan urusan perdagangan

1. Seksi Informasi Dan Hukum Perdagangan
2. Seksi Usaha Dan Jasa Perdagangan
3. Seksi Sarana Distribusi Perdagngan

1) Seksi Informasi Dan Hukum Perdagangan

Tugas Pokok

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seksi Informasi Dan Hukum Perdagangan mempunyai tugas membantu kepada bidang perdagngan dalam melaksanakan sub urusan informasi dan hukum perdagangan.

Fungsi

1. Penyusunan program kerja
2. Pelaksanaan pelayanan umum
3. Penyediaan tentang data wajib daftar perusahaan
4. Penyediaan dikumenn yang diperlukan oleh pimpinan
5. Pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama
6. Pengelolaan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data wajib daftar perusahaan
7. Pengelolaan, penyajian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri
8. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya
9. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan

Tugas Pokok

Seksi Usaha Dan Jasa Perdagangan mempunyai rincian tugas membantu kepala bidang perdagangan dalam sub urusan usaha dan jasa perdagangan.

Fungsi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Penyusunan program kerja
2. Pelaksanaan pelayanan umum
3. Penyediaan tentang data wajib daftar perusahaan
4. Penyediaan dikumenn yang diperlukan oleh pimpinan
5. Pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama
6. Pengelolaan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data wajib daftar perusahaan
7. Pengelolaan, penyajian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri
8. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya
9. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Seksi Sarana Distribusi Perdagngan

Tugas Pokok

Seksi Sarana Distribusi Perdagngan mempunyai rincian tugas membantu kepala bidang perdagangan dalam sub urusan Sarana Distribusi Perdagngan.

Fungsi

1. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM di wilayah kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen da pangkalan dan sampai konsumen akhir diwilayah kota
3. Peningkatan barang-barang ekspor, pengawasan terhadap mutu barang-barang impor dan yang akan diekspor
4. Persiapan, meneliti dan memproses terhadap permohonn penerbitan angka impor
5. Pemprosesan permohonan, pemberian, pencabutan angka pengenal impor
6. Pendataan, evaluasi dan pendataan terhadap pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor
7. Penyusuanan program kerja
8. Pelaksanaan pelayanan umum
9. Penyediaan dokumenn yang diperlukan oleh pimpinan
10. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya
11. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
12. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Perindustrian

Tugas Pokok

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu sebgagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan urusan perindustrian

Fungsi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Penyusuanan program dan rencana kegiatan dibidang industry
2. Penetapan bidang industry prioritas dan unggulan
3. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong
4. Promosi produk industry
5. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industry
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan standarisasi
7. Penerapan standar kompetensi sumber daya manuasia industry dan Pembina industry
8. Pelaksanaan fasilitas akses permodalan
9. Pemberian fasilitas kemitraan dan kerjasama
10. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industry kecil dan menengah serta industry kereatif
11. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industry
12. Penyusuanan tata ruang industry
13. Pembinaan industry dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industry.
14. Pendataan, analisis dan desiminasi data industry
15. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industry
16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perindustrian terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Industry
2. Seksi Sarana Dan Usaha Industry

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Seksi Kerjasama Dan Informasi Industri

1) Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Industry

Tugas Pokok

Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Industry mempunyai rincian tugas membantu kepala bidang perindustrian dalam sub urusan Pembinaan dan Pengembangan Industry.

Fungsi

1. Penyusuanan program dan rencana kegiatan
2. Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja
3. Perumusan dan pelaksanaan fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industry kecil dan menengah serat industry kereatif
4. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong..
5. Penyusunan bimbingan teknis, terhadap mutu hasil produksi, penerapan standarisasi dan membantu kelancaran pengadaan peralatan bahan baku, bahan pembantu, barang mmodal serta pengembangan diverifikasi produk
6. Penyediaan fasilitas akses permodalan bagi industry melalui bank dan lemaga keuangan bukan bank
7. Pembinaan terhadap asosiasi industry/ dewan industry daerah
8. Perumusan dan penetapan standar kompetensi SDM industry dan membentuk aparatur pembinaan industry daerah
9. Penyiapan dan pengusulan diklat SDM industry dan aparatur Pembina industry

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Penyusuan bahan bimbingan pembinaan dalam pemilihan dan penggunaan bahan baku/ bahan pembantu
11. Perumusan dan pelaksanaan penelitian pengembangan dan pemanfaatan teknologi bidang industry
12. Perumusan dan pelaksanaan sosilaisasi teknologi bidang industry
13. Pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Sarana dan Usaha Industri

Tugas Pokok

Seksi Sarana dan Usaha Industri mempunyai rincian tugas membantu kepala bidang perindustrian dalam sub urusan Sarana dan Usaha Industri.

Fungsi

1. Penyusuanan program dan rencana kegiatan
2. Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja
3. Perumusan dan penciptaan indutri yang layak dan terhindar dari produksi limbah berbahaya
4. Pemberian rekomendasi usaha industry / pindah usaha industry/ perusahaan usaha industry dan kawasan industry
5. Pemberian perlindungan kepastian usaha
6. Penetapan bidang usaha industry unggulan dan prioritas daerah
7. Pelaksanaan promosi produk industry daerah
8. Perumusan dan pengembangan sarana dan kemampuan sarana
9. Pengajuan pembentukan UPT/ unit usaha industry

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Penyusunan rencana kerja industri meliputi rencana pembangunan jangka menengah
11. Perumusan dan penyusunan tata ruang industry
12. Pelaksanaan pendataan, analisis dan desiminasi data serta pelaporan ke pemerintah provinsi
13. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaaan pencemaran lingkungan
14. Pelaksanaan pembinaan HKI dan desain produk industry
15. Pelaksanaan pengwasan dan fasilitas standarisasi bidang industry
16. Penyusunan petunjuk teknis pendataan dan pemutahiran data industry kecil dan besar, serta bimbingan terhadap kelompok usaha bersama
17. Pelaksanaan pendataan laporan produksi usaha industry
18. Pengendalian, pengawasan, evaluasi, pembinaan, dan pelaporan
19. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

Tugas Pokok

Seksi Kerjasama dan Informasi Industri mempunyai rincian tugas membantu kepala bidang perindustrian dalam sub urusan Kerjasama dan Informasi Industri.

Fungsi

1. Penyusuanan program dan rencana kegiatan
2. Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja
3. Perumusan kegiatan dan pelaksanaan promosi produk industry

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaaan kerjasama antar usaha industry
5. Perumusan peningkatan dan pengembangan sistem informasi industry bagi kalangan internal dan eksternal
6. Pelaksanaan fasilitas kemitraan, kerjasama dalam pengembangan industry, antara industry kecil, menengah, besar, dan sector ekonomi lainnya.
7. Perencanaan pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industry
8. Pengoordinasian pelaksanaan pengembangan peluang investasi sector industry
9. Pengoordinasian pembinaan agro industry serta industri hasil hutan
10. Pengoordinasian pembinaan industry logam, mesin, elektronika dan aneka
11. Melaksanakan pelayanan umum
12. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan
13. Pelaksana koordinasi pelaksanaan pengembangan peluang investasi sector industry, agro industry, industry hasil hutan,industry logam, mesin, elektronika dan aneka
14. Pelaksanaan koordinasi perumusan pembinaan industry kecil
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian

Tugas Pokok

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu sebgagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib Perdagangan dan Perindustrian.

Fungsi

1. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrologian, dan kepemilikan izin tanda usaha industry
2. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industry kecil
3. Penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industry, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan pergudangan
4. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana undang-undang metrology legal, melakukan ukur ulang mengolah data, pengawasan, penyuluhan, dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dari :

1. Seksi Pengawasan Metrology
2. Seksi Pengawasan Perdagangan
3. Seksi Pengawasan Perindustrian

1) Seksi Pengawasan Metrology

Tugas Pokok

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seksi Pengawasan Metrology mempunyai tugas membantu kepala bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam sub urusan Pengawasan Metrology

Fungsi

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang kemetrologian.
2. Pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang metrology
3. Pelaksanaan koordinasi dengan UPT metrology dalam hal pengawasan, penyaluran dan evaluasi terhadap penggunaan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Pengawasan Perdagangan

Tugas Pokok

Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu kepala bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam sub urusan Pengawasan Perdagangan.

Fungsi

1. Pengoordinasian, pembinaan, Penyusuanan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa
2. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pengoordinasian, pembinaan keterampilan sector industry dan perdagangan
4. Pengoordinasian, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan.
5. Pengoordinasian, pembinaan dengan industry terkait sesuai dengan bidang tugasnya
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Seksi Pengawasan Perindustrian

Tugas Pokok

Seksi Pengawasan Perindustrian mempunyai tugas membantu kepala bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam sub urusan Pengawasan Perindustrian.

Fungsi

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja
2. Pembinaan kelancaran arus barang, perdagangan antar wilayah, monitoring harga, pengandaan dan penyaluran serta stock bahan pokok kebutuhan masyarakat
3. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan
4. Penyediaan dokumen yang diperlukan pimpinan
5. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Pelaksanaan pengawasan kualitas barang atau jasa, kesehatan, keamanan dan kenyamanan
7. Pelaksanaan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hokum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang Pasar

Bidang Pasar merupakan salah satu dari empat bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagai hasil dari proses pelaksanaan Organisasi Perangkat daerah (OPD).

Tabel IV. 1: Tenaga Harian Lepas Bidang Pasar

No	Tugas	Jumlah
1	Buruh sapu pasar	72
2	Supir truk sampah	2
3	Buruh angkut	6
4	Satuan tugas	40
5	Satpam	6
	Jumlah	126

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Dari tabel IV. 1 dapat dilihat bahawasannya untuk THL dibidang pasar terdapat beberapa posisi, diantaranya buruh sapu beranggotakan 72 orang, Supir truk sampah 2 orang, Buruh angkut 6 orang, Satuan tugas 40 orang dan Satpam 126 orang, dimana dari masing-masing posisi yang telah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditetapkan oleh pimpinan agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Tugas Pokok

Bidang Pasar mempunyai tugas membantu sebgagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar.

Fungsi

1. Pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, oenelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan
2. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar.
3. Pengoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada
4. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar
5. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar
6. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar
7. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja
8. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan dibidang ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar
10. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusaan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait
11. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pasar
12. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar
13. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungutan retribusi pengelolaan pasar dengan kepala bagian tata usaha
14. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan buku registrasi data pedagang dan buku registrasi pasar yang ada di dalam lingkungan pasar
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pasar terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Pasar Dan Pengawasan
2. Seksi Kebersihan, Keteriban, Dan Pembinaan PKL
3. Seksi Retribusi

1) Seksi Pengembangan Pasar Dan Pengawasan

Tugas Pokok

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan mempunyai tugas membantu kepala bidang pasar dalam sub urusan Pengembangan Pasar dan Pengawasan.

Fungsi

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja
2. Penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pengembangan pasar
3. Penelitian retribusi dan pengelolaan pasar, penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar
4. Penyusunan program kerja
5. Pelaksanaan pelayanan umum
6. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya
7. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
8. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pemimpin
9. Pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Pelaksanaan program/ laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar
11. Pelaksanaan pengumpulan data dibidang retribusi pengelolaan pasar
12. Pengawasan terhadap penerimaan pemasukkan retribusi pengelolaan pasar
13. Pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Kebersihan, Keteriban, dan Pembinaan PKL

Tugas Pokok

Seksi Kebersihan, Keteriban, dan Pembinaan PKL mempunyai tugas membantu kepala bidang pasar dalam sub urusan Kebersihan, Keteriban, dan Pembinaan PKL.

Fungsi

1. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja
2. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja
3. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganlisa laporan-laporan peristiwa- peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertibanpasar
4. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan tugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar
5. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan didalam lingkungan pasar
6. Penyiapan bahan dan peralatan kerja
7. Pengawasan, pemiliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar
9. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
10. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan
11. Pengendalian, pengawsan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan
12. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima
13. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan kebersihan pembinaan pedagang
14. Penempatang pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi
15. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima kearah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan
16. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima
17. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Retribusi
Tugas Pokok

Seksi Retribusi mempunyai tugas membantu kepala bidang pasar dalam sub urusan Retribusi.

Fungsi

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar
3. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi metrology
4. Pemiliharaan dokumen penagihan secara teratur kepada wajib retribusi
5. Penyelesaian tunggakan-tunggakan dari wajib retribusi berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait
6. Penginventasisasian permasalahan dari penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
7. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan
8. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
9. Pengelolaan data penerimaan retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi dengan sub yang terkait
10. Penyusunan rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar
11. Penyusunan perhitungan penerimaan retribusi pengelolaan pasar
12. Penyimpanan serta memilihara arsip yang berhubungan dengan retribusi pengelolaan pasar
13. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan buku registrasi data pedagang dan buku registrasi pengelolaan pasar yang ada dilingkungan pasar berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait
14. Pelaksanaan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Sumber daya organisasi yang biasa disebut 6M : Man, Money, Material, Mechine, Method, Market. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital dalam penyelengaraan pelaksanaan otonomi daerah dibidang perindustrian dan perdagangan. Terkait hal tersebut, berikut ini data sumber daya manusia ataupun data kepegawaian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV. 2: Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	72
2	Sarjana (S1)	2
3	Diploma III (D3)	6
4	SMA	40
5	SD	6
	Jumlah	126

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Dapat dilihat dari tabel IV.2 dimana untuk data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan untuk tingkat Pasca Sarjana (S2) berjumlah 72 Orang, Sarjana (S1) 2 orang, Diploma III (D3) 6 orang, SMA 40 Orang dan SD 6 orang.

Tabel IV. 3: Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan atau Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	2

2	Golongan II	20
3	Golongan III	20

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Dapat dilihat dari tabel IV.3 dimana untuk data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan golongan atau ruang, yaitu ada Golongan I berjumlah 2 orang, Golongan II berjumlah 20, Golongan III 20 orang.

Tabel IV. 4: Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

No	Golongan	Jumlah
1	Diklat PIM TK. IV	10
2	Diklat PIM TK. III	1

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Dapat dilihat dari tabel IV.3 dimana untuk data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Diklat Kepemimpinan, dimulai dari Diklat PIM TK. IV berjumlah 10 orang, Diklat PIM TK. III 10 orang.

Tabel IV. 5: Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Golongan	Jumlah
1	Eselon IV	13
2	Eselon III	1

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dapat dilihat dari tabel IV.3 dimana untuk data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Struktural, diantaranya Eselon IV berjumlah 13 orang dan Eselon III 1 orang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab V ini akan dibahas mengenai identitas responden, hasil penelitian, serta pembahasan masing-masing indikator penelitian

A. Identitas Responden

Identitas Responden diguna kan untuk menjawab tujuan dari penelitian, selain itu juga diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas antara data responden dengan analisis yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, seperti melalui wawancara dan kusioner. Untuk tahap awal analisa data, maka yang pertama dilakukan adalah mengenai karakteristik responden. Hal ini bertujuan agar dapat mengidentifikasi tingkatan pada populasi yang dijadikan responden pada penelitian ini.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pasar, Seksi kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Seksi Retribusi, dan juga menyebarkan kusioner sebanyak 20 rangkap. 10 rangkap untuk pedagang kaki lima yang belum memiliki kartu tanda daftar pedagang dan 10 rangkap lagi untuk pedagang kaki lima yang sudah memiliki kartu tanda daftar pedagang

Adapun identitas responden yang dianggap perlu untuk dijelaskan pada penelitian ini diantaranya berdasarkan jenis kelamin, umur , dan jenis usaha.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, jenis kelamin juga mempengaruhi emosiaonal dan kinerja responden yang bersangkutan dalam bekerja. Untuk lebih jelas identitas responden di Area Car Free Day Kota Pekanbaru bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1: Distribusi Jumlah Responden Pedagang Kaki Lima Menurut Jenis Kelamin di Area Car Free Day Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	12	60 %
2	Perempuan	8	40 %
	Jumlah	20	100 %

Sumber:Olahan Data Peneliti 2020

Dari Tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah responden yang berjualan di Area Car Free Day Kota Pekanbaru jika dilihat dari jenis Kelamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 12 orang dengan presentase 60% dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang dengan presentase 40%.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan. Usia juga merupakan satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa seseorang yang memiliki usia yang lebih tua kemampuan fisiknya akan jauh

berbeda dari seseorang yang lebih muda seperti lebih mudah kelelahan dalam melakukan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut :

Tabel V.2: Distribusi Jumlah Responden Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Area Car Free Day Kota Pekanbaru Menurut Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30	11	55%
2	31-40	9	45%
3	>50	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber:Olahan Data Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk reponden yang berusia berkisar 20 - 30 sebanyak 11 orang dengan presentase 55%, kemudian yang berusia 31-40 sebanyak 9 orang dengan presentase 45%, kemudian usia >50 tidak ada

3. Identitas Responden berdasarkan Jenis Usaha

Tabel V.3: Distribusi Jumlah Responden Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Jenis Usaha di Area Car Free Day Kota Pekanbaru

No	Usaha	Jumlah	Persentase
1	Makanan	9	45%
2	Pakaian	2	10%
3	Minuman	4	20%
4	Parfume	1	5%
5	Mainan anak	2	10%
6	Jilbab	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber:Olahan Data Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk reponden yang memiliki jenis usaha makanan sebanyak 9 orang dengan presentase 40% hal ini dikarenakan banyak pengunjung yang lebih memburu makanan pada saat Car Free Day, pedagang yang berjualan pakaian sebanyak 2 orang dengan presentase 10%,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

minuman sebanyak 4 orang dengan presentase 20%, Parfume 1 orang dengan presentase 5%, mainan anak 1 orang dengan presentase 5% dan yang terakhir jilbab sebanyak 2 orang dengan presentase 10%.

B. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota pekanbaru

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pengawasan dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Bidang Pasar yang memiliki kewenangan tersebut, maka perlu kiranya pengawasan yang dilakukan harus lebih efektif agar tidak ditemukan lagi pedagang yang berjualan yang belum memiliki memiliki kartu tanda daftar pedagang tersebut.

Untuk memahami tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP**)**, maka penulis menetapkan Pedagang yang sudah memiliki kartu tanda daftar pedagang, Pedagang yang belum memiliki kartu tanda daftar pedagang , Kepala Bidang Pasar, Seksi kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, serta Seksi Retribusi. Sedangkan untuk memahami dan menganalisis penilaian tentang tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP**)** (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota pekanbaru, maka dapat dilihat dari indikator variabel berikut ini :

1. **Menetapkan Standar**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Mockler dalam (Zulkifli 2015: 255) bahwa menetapkan standar yaitu merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas, harapan dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi dan program kerja yang sudah ditetapkan direalisasikan seluruhnya antara harapan yang direncanakan dan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaaan dapat tercapai. Menetapkan standar juga merupakan tahap awal dalam pengawasan adalah menetapkan standar pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pengururs an kartu tanda daftar pedagang.

Untuk dapat mengetahui tentang bagaimana Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP), maka penulis mengajukan pertanyaan kepada responden melalui indikator Menetapkan Standar, untuk dapat melihat penilaian responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.4a: Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang sudah Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikataor Menetapkan Standar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Pemberian izin usaha oleh bidang pasar	4	4	2	10
2	Ketentuan aturan dalam pengurusan kartu	5	5	0	10
3	Pengumpulan data terkait izin usaha dalam pengurusan kartu	2	1	7	10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	tanda daftar pedagang				
Jumlah		11	10	9	30

Sumber:Data Olahan peneliti Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.4a dapat di jelaskan bahwa mengenai Syarat-syarat dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang pada Indikator Menetapkan Standar berdasarkan Pada point pertama pemberian izin usaha oleh bidang pasar pada skala Terlaksana sebanyak 4 Responden dengan alasan bahwa pemberian izin untuk berjulan di Area Car Free Day yang diberikan oleh Bidang Pasar sudah sesuai dengan standar yang berlaku salah satu contoh pedagang harus memiliki kartu tanda daftar pedagang agar bisa berjualan, sedangkan untuk skala Cukup Terlaksana 4 Responden dan Kurang Terlaksana 2 Responden

Pada point ke dua ketentuan aturan dalam pengurusan kartu pada skala Terlaksana terdapat 5 Responden yang menjawab dengan alasan bahwa aturan dalam pengurusan kartu sudah cukup jelas sebagaimana yang telah disampaikan melalui surat edaran dari bidang pasar, selanjutnya 5 Responden menjawab Cukup Terlaksana dan yang menjawab Kurang Terlaksana tidak ada.

Pada point ke tiga Pengumpulan data terkait izin usaha dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang yang menjawab Terlaksana 2 responden dengan alasan bahwa Bidang Pasar sebelumnya sudah mendata pedagang kaki lima lama yang berjualan di area car free day lama yang terletak di Diponegoro jadi untuk yang sudah punya kartu tinggal memperpanjang masa berlaku kartu tersebut, 1 Responden yang menjawab Cukup Terlaksana dan 7 Responden menjawab Kurang Terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.4b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang sudah Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikataor Menetapkan Standar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana (X 3)	Cukup Terlaksana (X 2)	Kurang Terlaksana (X 1)	Jumlah
1	Pemberian izin usaha oleh bidang pasar	12	8	2	22
2	Ketentuan aturan dalam pengurusan kartu	15	10	0	25
3	Pengumpulan data terkait izin usaha dalam	6	2	7	15
	pengurusan kartu tanda daftar pedagang				
Jumlah		33	20	9	62

Sumber:Data Olahan peneliti Tahun 2020

Rumus : Skala tertinggi x jumlah pertanyaan x banyak responden

3 x 3 x 20 = 180

Skala terendah x jumlah pertanyaan x jumlah responden

1 x 3 x 20 = 60

Interval $= \frac{180-60}{3}$

= 40

Terlaksana : 141 - 180

Cukup Terlaksana : 101 - 140

Kurang Terlaksana : 60 - 100

Berdasarkan Tabel V.4b diatas dapat di lihat mengenai pengurusan kartu tanda daftar pedagang pada Indikator Menetapkan Standar pada kategori Terlaksana dengan jumlah Skor 33 karena responden menilai bahwa Bidang Pasar telah melakukan tugasnya yaitu pengawasan dalam pengurusan kartu sudah sesuai dengan peraturan yang ada seperti \ memberikan kemudahan dalam pengurusan kartu tersebut.

Selanjutnya dengan jumlah Skor 20 berada pada kategori Cukup terlaksana, karena responden sendiri menilai bahwa mereka telah melakukan sesuai dengan aturannya Namun ada beberapa kendala dalam proses pengurusan kartu tersebut, seperti adanya beberapa pedagang kaki lima yang pendatang baru yang berjualan namun belum mendatakan diri ke Bidang Pasar.

Selanjutanya jawaban responden dengan jumlah skor 9, berada pada kategori Kurang Terlaksana, dimana ada beberapa pedagang yang tidak memahami bagaimana cara ataupun proses dari pengurusan kartu tanda daftar pedagang.

Jadi dari hasil kuisioner diketahui bahwa tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP**)** (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota pekanbaru ,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan 20 Responden yang terdiri dari yaitu, 10 Responden yang sudah memiliki kartu dan 10 Responden yang belum punya kartu terhadap indikator Menetapkan Standar jumlah Skor 62, berada pada kategori “Kurang Terlaksana” dalam skala Inrterval 60 - 100

Untuk mengetahui sejauh mana pegawai dari Bidang Pasar dalam melakukann pengwasan, berikut ini wawancara penulis dengan kepala seksi kebersihan, ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima Bapak Syafrudin pada tanggal 7 November 2019 pukul 10:27 WIB

“Jadi sebenarnya sampai detik ini untuk masalah pedagang kaki lima di Area Car Free Day, Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota terkait tentang pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pasar itu belum ada. dalam hal melakukan pengawasan dalam hal ini memang belum adanya regulasi yang mengatur secara kuat didalam melakukan pengawasan tetapi surat perintah tugas dari Dinas ada, sehinngga untuk kami yang turun kelapangan itu hanya melakukan pengawasan secara spontan, disamping kami melakukan penertiban dan pengamanan, karna untuk menghindari ricuhnya atau rebutnnya masalah pedagang dilapangan. Jadi kedepan tugas kami memang membentuk SOP yang benar-benar mengikat, sehingga saat kami turun benar-benar memiliki kekuatan hukum. Jadi sementara ini yang kami lakukan merupakan tindakan yag mendukung keberhasilan program kartu tanda daftar pedagang, supaya benar-benar terlaksana, sehingga kami memastikan bahwa program bidang pasar ini terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil observasi peneliti, disini peniliti melihat bahwasannya dari penetapan standar yang dilakukan oleh Bidang Pasar dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima terkait tentang kepemilikan kartu tanda daftar pedagang Kurang Terlaksana hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syafrudin yang menjelaskan bahwasannya belum ada peraturan yang mengatur terkait tentang pengawasan yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima.

Peneliti juga mendapatkan temuan lapangan bahwa dari beberapa kegiatan pedagang yang berjualan masih adanya pengawasan yang kurang maksimal, karna banyak juga para pedagang yang belum memiliki kartu tanda pedagangang, ini menunjukan bahawa adannya kurang optimal dari kinnerja dinas perdagangan dan penindustrian, sehingga ini menjadi kendala didalam penertiiban masalah pedagang yang berjualan.

Dari hasil data Kusioner, wawancara serta ovservasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, dapat disimpulkan bahwasannya Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedgang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru "Kurang Terlaksana"

2. Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar

Membandingkan kinerja sesuai dengan standar, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Prindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang, yaitu pedagang kaki lima yang berjualan di Area Car

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Free Day. Dimana pada saat berjualan masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan yang tidak memiliki kartu untuk itu Bidang Pasar melakukan pengawasan dengan cara pemeriksaan rutin setiap minggunya untuk menyempurnakan tugas agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan kemudian melakukan sidak untuk melihat langsung keadaan dilapangan dan laporan yaitu berupa pertanggungjawaban baik secara tertulis maupun laporan.

Untuk melihat Pengawasan dalam Pengurusan Kartu Tanda daftar pedagang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.5a: Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang sudah Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Melaksanakan pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam kepemilikan kartu	7	3	0	10
2	Pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar	4	3	3	10
3	Apakah ada Pengawasan rutin yang dilakukan oleh bidang pasar	7	2	1	10
Jumlah		18	8	4	30

Sumber : Olahan Data Peneliti 2020

Pada Tabel V.5a dapat di jelaskan bahwa mengenai Pengawasan dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang pada Indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 20 Responden diantaranya 10 responden yang sudah memiliki kartu dan 10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

responden yang belum memiliki kartu tanggapan atau jawaban responden pada item pertama Melaksanakan pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam kepemilikan kartu sebanyak 7 Responden menjawab Terlaksana dengan alasan bahwa setiap kegiatan Car Free Day Berlangsung Bidang Pasar memang melakukan Pengawasan hal ini terlihat dari kepala Bidangnya langsung yang turun kelapangan, selanjutnya yang menjawab pada skala Cukup Terlaksana ada sebanyak 3 Responden dengan alasan bahwasannya hanya sebagian yang diperiksa oleh Bidang Pasar terkait kepemilikan kartu tanda daftar pedagang, dan yang menjawab Kurang Terlaksana tidak ada.

Untuk Item ke dua yaitu Pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar pada skala terlaksana ada 4 Responden yang menjawab Terlaksana dengan alasan pada saat melakukan pengawasan bidang pasar telah melaksankan tugasnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh atasannya, selanjutnya pada skala Cukup Terlaksana sebanyak 3 Responden dan pada skala Kurang Terlaksana sebanyak 3 responden.

Untuk Item ke tiga yaitu apakah ada pengawasan rutin yang dilakukan oleh bidang pasar pada skala terlaksana ada 7 Responden yang menjawab Terlaksana dengan alasan pada saat melakukan pengawasan bidang pasar telah melaksankan tugasnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh atasannya, selanjutnya pada skala Cukup Terlaksana sebanyak 2 Responden dengan alasan bahwa masih banyak pedagang yang tidak memiliki kartu tanda daftar pedagang contohnya pedagang dadakan dan pada skala Kurang Terlaksana sebanyak 1 responden.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.5b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang sudah Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana (X 3)	Cukup Terlaksana (X 2)	Kurang Terlaksana (X 1)	Jumlah
1	Melaksanakan pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam kepemilikan kartu	21	6	0	27
2	Pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar	12	6	3	21
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	Apakah ada Pengawasan rutin yang dilakukan oleh bidang pasar	21	4	1	26
Jumlah		**54**	**16**	**4**	**74**

Sumber : Olahan Data Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel V.5b diatas dapat di lihat Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengrurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang pada Indikator Membandingkan Kinerja sesuai dengan Standar pada kategori Terlaksana dengan jumlah Skor 54 karena responden ini menilai bahwasanya pengawasan sudah terlaksana sesuai dengan standar namun hanya beberapa yang sesuai standar, ada sebagian pengawasan yang dilakukan Cuma sekedar lewat sekedar untuk memantau saja.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya dengan jumlah Skor 16 berada pada kategori Cukup terlaksana, karena responden sendiri menilai bahwa mereka telah melakukan sesuai dengan aturannya Namun ada beberapa kendala yang mungkin di alami oleh Bidang Pasar dalam melakukan Pengawasan salah satunya untuk mendata pedagang kaki lima yang begitu banyak. Dengan jumlah Skor 4 berada pada kateori Kurang Terlaksana.

Jadi dari hasil kuisioner peneliti terhadap responden terhadap indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar jumlah Skor 74, berada pada kategori "Kurang Terlaksana" dalam skala Inrterval 60 – 100

Untuk mengetahui sejauh mana pegawai dari Bidang Pasar dalam melakukann pengwasan, berikut ini wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pasar Bapak Syafrudin pada tanggal 7 November 2019 pukul 10:27 WIB

" Untuk mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di Area Car Free Day ada yang namanya Satgas dari Bidang pasar, Biasanya kami turun kelapangan mulai dari jam 5 subuh, anggota kami yang memakai baju coklat itu dia yang mengawasi. Pengawasan ini rutin kami lakukan dengan 20 sampai 30 anggota dari Bidang Pasar sendiri setiap minggunya. Adapun pengeawasan ini dilakukan agar pedagang yang berjualan tidak melewati batas yang telah ditentukan oleh Bidang Pasar serta kami memantau pedagang yang berjualan namun belum memiliki izin yang ditandai dengan memiliki kartu tanda daftar pedagang. Tidak hanya pengawasan rutin yang kami lakukan, kami juga melakukan sidak (inspeksi mendadak).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, dapat mennyimpulkan bahwa beberpa upaya penertiban yang sudah dilakukan oleh dinas pasar tidak setiap minggu melakukan pemeriksaan dan penertiban langsung yang melibatkan tim pengawasan turn kejalan, ada juga bahkan tidak dilakukannya pengwasan, pada permasalahan ini, disamping masalah banyaknya para pedagang yang belum memiliki kartu Tanda Pedagang (TDP) jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa pada indikator ini berada pada ukuran kurang terlaksana.

3. Mengambil Tindakan Perbaikan

Mengambil tindakan perbaikan yaitu manakala ditemukan pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu tanda pedagang atau izin untuk berjualan di area Car Free Day perlu diambil tindakan berupa sanksi bagi yang tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Tabel V.6a: Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang sudah Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Apakah ada sidak yang dilakukan oleh Bidang Pasar	8	1	1	10
2	Bagaimana Sidak yang dilakukan	3	6	1	10
3	Sanksi yang diberikan oleh bidang pasar	2	2	6	10
Jumlah		**13**	**9**	**8**	**30**

Sumber : Olahan Data Peneliti 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada Tabel V.6a dapat di jelaskan bahwa mengenai Pengawasan dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang pada Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 20 Responden diantaranya 10 responden yang sudah memiliki kartu dan 10 responden yang belum memiliki kartu tanggapan atau jawaban responden pada item pertama menanyakan apakah ada sidak yang dilakukan oleh Bidang Pasar sebanyak 8 Responden menjawab Terlaksana, selanjutnya yang menjawab pada skala Cukup Terlaksana ada sebanyak 1 Responden dengan alasan bahwasannya hanya beberapa kali Bidang Pasar melakukan Sidak, dan yang menjawab Kurang Terlaksana 1.

Untuk Item ke dua yaitu Sanksi yang diberikan oleh bidang pasar pada skala terlaksana ada 3 Responden yang menjawab Terlaksana, selanjutnya pada skala Cukup Terlaksana sebanyak 6 dan pada skala Kurang Terlaksana sebanyak 1 responden.

Untuk Item ke empat yaitu Pelaksanaan sanksi peringatan tertulis maupun secara langsung pada skala terlaksana terdapat 2 Responden yang menjawab Terlaksana, selanjutnya pada skala Cukup Terlaksana sebanyak 2 Responden dan pada skala Kurang Terlaksana sebanyak 6 responden

Tabel V.6b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang sudah Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana (X 3)	Cukup Terlaksana (X 2)	Kurang Terlaksana (X 1)	Jumlah
1	Apakah ada sidak yang dilakukan	24	2	1	27

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	oleh Bidang Pasar				
2	Sanksi yang diberikan oleh bidang pasar	9	12	1	22
3	Pelaksanaan sanksi peringatan tertulis maupun secara langsung	6	4	6	16
Jumlah		**39**	**18**	**8**	**65**

Sumber : Olahan Data Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel V.6b diatas dapat di lihat Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengrurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang pada Indikator melakukan tindakan perbaikan pada kategori Terlaksana dengan jumlah Skor 39 karena responden ini menilai bahwasanya sanksi yang diberikan sudah terlaksana, namun tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik

Selanjutnya dengan jumlah Skor 18 berada pada kategori Cukup terlaksana, dan dengan jumlah Skor 8 berada pada kateori Kurang Terlaksana dengan alasan bahwa tidak ada sanksi yang diberikan, karena jika dilihat masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu namun tetap bisa berjualan.

Jadi dari hasil kuisioner peneliti terhadap responden terhadap indikator Mengambil Tindakan Perbaikan jumlah Skor 65, berada pada kategori “Kurang Terlaksana” dalam skala Inrterval 60 – 100

Untuk dapat mengetahui tentang bagaimana Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP), maka penulis mengajukan pertanyaan kepada responden melalui indikator Menetapkan Standar, Membandingkan Kinerja dengan Standar, Mengambil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tindakan Perbaikan dan pada tabel dibawah ini penulis mengajukan pertanyaan kepada 10 responden yang belum memiliki kartu, untuk dapat melihat penilaian responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Untuk lebih jelas, berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pasar Bapak Suhardi Pada Tanggal 23 Juli 2019 Pukul 11:26

"*Jadi gini, jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di Area Car Free Day itukan setiap minggunya selalu bertambah jadi perlu diawasi, yang diawasi itu jangan sampai pedagang yang sudah ditertibkan pada saat berjualan melewati jalur pembatas yang sudah ditentukan. Nah dan untuk pedagang yang tidak memenuhi ketentuan yang telah kami tetapkan maka kami akan memberikan sanksi langsung kepda pedagang yang tidak memiliki kartu tanda daftar pedagang dimana pedagang kaki lima tersebut tidak diperbolehkan berjualan.*

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan kurang maksimal karena masih adanya pedagang yang pendatang dan tidak memiliki kartu pedagang dapat berjualan di kawasan Carr free day. Sehingga dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan kartu Tanda Pedagang ini tidak efektif karena disini dapat dilihat bahwa tidak adannya perbedaan yang membedakan mana yang memiliki kartu dan mana penjual yang tidak memilii kartu tanda pedagang. Sehingga perlu diperhatikan bahwa perlu adanya tindakan yang lebih serius didalam penerapan program penerapan kartu Tanda Pedagang (TDP) sehingga lebih nyata perubahan bahkan dampak penerapan peraturan dalam mengatur pedagang di area Carr free day.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. **Menetapkan Standar**

Tabel V.7a: Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang belum Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) mengenai Indikator Menetapkan Standar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Pemberian izin usaha oleh bidang pasar	8	1	1	10
2	Ketentuan aturan dalam pengurusan kartu	4	4	2	10
3	Pengumpulan data terkait izin usaha dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang	1	2	7	10
Jumlah		**13**	**7**	**10**	**30**

Sumber : Olahan Data Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel V.6a dapat di jelaskan bahwa mengenai Syarat-syarat dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang pada Indikator Menetapkan Standar berdasarkan item pertama pemberian izin usaha oleh bidang pasar pada skala Terlaksana sebanyak 8 Responden dengan alasan bahwa pemberian izin untuk berjulan di Area Car Free Day yang diberikan oleh Bidang Pasar sudah sesuai dengan standar yang berlaku salah satu contoh pedagang harus memiliki kartu tanda daftar pedagang agar bisa berjualan, seangkan untuk skala Cukup Terlaksana 1 Responden dan Kurang Terlaksana 1 Responden dengan alasan bahwa kurang perhatiannya dari Bidang pasar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada point ke dua ketentuan aturan dalam pengurusan kartu pada skala Terlaksana terdapat 4 Responden yang menjawab dengan alasan bahwa aturan dalam pengurusan kartu sudah cukup jelas sebagaimana yang telah disampaikan melalui surat edaran dari bidang pasar, selanjutnya 4 Responden menjawab Cukup Terlaksana dan yang menjawab Kurang Terlaksana 2 dengan alasan bahwa pada proses pembuatan kartu berdasarkan informasi yang didapatkan dimana untuk pembuatan kartu dari masing-masing pedagang berbeda, ada yang 15.000 dan ada juga yang 20.000.

Pada point ke lima Pengumpulan data terkait izin usaha dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang yang menjawab Terlaksana 1 responden dengan alasan bahwa Bidang Pasar sebelumnya sudah mendata pedagang kaki lima lama yang berjualan di area car free day lama yang terletak di Diponegoro jadi untuk yang sudah punya kartu tinggal memperpanjang masa berlaku kartu tersebut, 2 Responden yang menjawab Cukup Terlaksana dan 7 Responden menjawab Kurang Terlaksana dengan alasan bahwa bidang pasar sendiri kurang dalam mengumpulkan data karena jika dilihat sebenarnya masih banyak yang belum punya kartu dan bidang pasar sendiri hanya mendata pedagang yang sudah punya kartu lama dan yang melakukan perpanjangan.

Tabel V.7b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang belum Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) mengenai Indikator Menetapkan Standar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana (X3)	Cukup Terlaksana (X2)	Kurang Terlaksana (X1)	Jumlah
1	Pemberian izin usaha oleh bidang	24	3	1	28

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	pasar				
2	Ketentuan aturan dalam pengurusan kartu	12	8	2	22
3	Pengumpulan data terkait izin usaha dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang	3	6	7	16
Jumlah		**39**	**17**	**10**	**66**

Sumber : Olahan Data Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel V.6b diatas dapat di lihat mengenai pengurusan kartu tanda daftar pedagang pada Indikator Menetapkan Standar pada kategori Terlaksana dengan jumlah Skor 39 karena responden menilai bahwa Bidang Pasar telah melakukan tugasnya yaitu pengawasan dalam pengurusan kartu sudah sesuai dengan peraturan yang ada seperti \memberikan kemudahan dalam pengurusan kartu tersebut.

Selanjutnya dengan jumlah Skor 17 berada pada kategori Cukup terlaksana, karena responden sendiri menilai bahwa mereka telah melakukan sesuai dengan aturannya Namun ada beberapa kendala dalam proses pengurusan kartu tersebut, seperti adanya beberapa pedagang kaki lima yang pendatang baru yang berjualan namun belum mendatakan diri ke Bidang Pasar.

Selanjutanya jawaban responden dengan jumlah skor 10, berada pada kategori Kurang Terlaksana, dimana ada beberapa pedagang yang tidak memahami bagaimana cara ataupun proses dari pengurusan kartu tanda daftar pedagang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jadi dari hasil kuisioner diketahui bahwa tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP**)** (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota pekanbaru , dengan 20 Responden yang terdiri dari yaitu, 10 Responden yang sudah memiliki kartu dan 10 Responden yang belum punya kartu terhadap indikator Menetapkan Standar jumlah Skor 66, berada pada kategori "Kurang Terlaksana" dalam skala Inrterval 60-100

2. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Tabel V.8a: Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang belum Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Melaksanakan pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam kepemilikan kartu	4	4	2	10
2	Pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar	4	3	3	10
3	Apakah ada Pengawasan rutin yang dilakukan oleh bidang pasar	2	5	3	10
	Jumlah	**10**	**12**	**8**	**30**

Sumber : Olahan Data Peneliti 2020

Pada Tabel V.8a dapat di jelaskan bahwa mengenai Pengawasan dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang pada Indikator Membandingkan Kinerja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sesuai dengan Standar berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 20 Responden diantaranya 10 responden yang belum memiliki kartu tanggapan atau jawaban responden pada item pertama Melaksanakan pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam kepemilikan kartu sebanyak 4 Responden menjawab Terlaksana dengan alasan bahwa setiap kegiatan Car Free Day Berlangsung Bidang Pasar memang melakukan Pengawasan hal ini terlihat dari kepala Bidangnya langsung yang turun kelapangan, selanjutnya yang menjawab pada skala Cukup Terlaksana ada sebanyak 4 Responden dengan alasan bahwasannya hanya sebagian yang diperiksa oleh Bidang Pasar terkait kepemilikan kartu tanda daftar pedagang, dan yang menjawab Kurang Terlaksana 2 Responden.

Untuk Item ke dua yaitu Pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar pada skala terlaksana ada 4 Responden yang menjawab Terlaksana dengan alasan pada saat melakukan pengawasan bidang pasar telah melaksankan tugasnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh atasannya, selanjutnya pada skala Cukup Terlaksana sebanyak 3 Responden dan pada skala Kurang Terlaksana sebanyak 3 responden dengan alasan bahwa jika Bidang Pasar telah melakukan pengawasan tapi nayatanya masih banyak pedagang yang belum punya kartu.

Untuk Item ke tiga yaitu apakah ada pengawasan rutin yang dilakukan oleh bidang pasar pada skala terlaksana ada 2 Responden yang menjawab Terlaksana dengan alasan pada saat melakukan pengawasan bidang pasar telah melaksankan tugasnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh atasannya, selanjutnya pada skala Cukup Terlaksana sebanyak 5 Responden dengan alasan bahwa masih banyak pedagang yang tidak memiliki kartu tanda daftar pedagang contohnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pedagang dadakan dan pada skala Kurang Terlaksana sebanyak 3 responden dengan alasan bahwa sebelumnya belum pernah melihat ada yang mengawasi, dan jika ada pengawasan rutin tentunya pedagang yang tidak punya kartu pasti banyak yang terjaring.

Tabel V.8b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang belum Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana (X 3)	Cukup Terlaksana (X 2)	Kurang Terlaksana (X 1)	Jumlah
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Melaksanakan pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam kepemilikan kartu	12	8	2	22
2	Pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar	12	6	3	21
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	Apakah ada Pengawasan rutin yang dilakukan oleh bidang pasar	6	10	3	19
Jumlah		**30**	**24**	**8**	**62**

Sumber : Olahan Data Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel V.8b diatas dapat di lihat Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengrurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang pada Indikator Membandingkan Kinerja sesuai dengan Standar pada kategori Terlaksana dengan jumlah Skor 30 karena responden ini menilai bahwasanya pengawasan sudah terlaksana sesuai dengan standar namun hanya beberapa yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sesuai standar, ada sebagian pengawasan yang dilakukan Cuma sekedar lewat dan hanya memungut retribusi.

Selanjutnya dengan jumlah Skor 24 berada pada kategori Cukup terlaksana, karena responden sendiri menilai bahwa mereka telah melakukan sesuai dengan aturannya Namun ada beberapa kendala yang mungkin di alami oleh Bidang Pasar dalam melakukan Pengawasan salah satunya untuk mendata pedagang kaki lima yang begitu banyak. Dengan Skor 8 berada pada kateori Kurang Terlaksana.

Jadi dari hasil kuisioner peneliti terhadap responden terhadap indikator Memandingkan Kinerja dengan Standar jumlah Skor 62 , berada pada kategori "Kurang Terlaksana" dalam skala Inrterval 60 – 100

4. Mengambil Tindakan Perbaikan

Tabel V.9a: Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang belum Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Apakah ada sidak yang dilakukan oleh Bidang Pasar	1	1	8	10
2	Sanksi yang diberikan oleh bidang pasar	8	2	0	10
3	Pelaksanaan sanksi peringatan tertulis	7	2	1	10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	maupun secara langsung				
Jumlah		**16**	**5**	**9**	**30**

Sumber : Olahan Data Peneliti 2020

Pada Tabel V.9a dapat di jelaskan bahwa mengenai Pengawasan dalam pengurusan kartu tanda daftar pedagang pada Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 20 Responden diantaranya 10 responden yang belum memiliki kartu tanggapan atau jawaban responden pada item pertama menanyakan apakah ada sidak yang dilakukan oleh Bidang Pasar sebanyak 1 Responden menjawab Terlaksana, selanjutnya yang menjawab pada skala Cukup Terlaksana ada sebanyak 1 Responden dengan alasan bahwasannya hanya beberapa kali Bidang Pasar melakukan Sidak, dan yang menjawab Kurang Terlaksana 8 dengan alasan bahwa sebelumnya tidak pernah ada sidak yang dilakukan, bidang pasar hanya sekedar lewat untuk melihat keadaan dilapangan saja.

Untuk Item ke dua yaitu Sanksi yang diberikan oleh bidang pasar pada skala terlaksana ada 8 Responden yang menjawab Terlaksana, selanjutnya pada skala Cukup Terlaksana sebanyak 2 dan pada skala Kurang Terlaksana tidak ada.

Untuk Item ke tiga yaitu Pelaksanaan sanksi peringatan tertulis maupun secara langsung pada skala terlaksana terdapat 7 Responden yang menjawab Terlaksana, selanjutnya pada skala Cukup Terlaksana sebanyak 2 Responden dan pada skala Kurang Terlaksana 1.

Tabel V.9b : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima yang belum Memiliki Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana (X 3)	Cukup Terlaksana (X 2)	Kurang Terlaksana (X 1)	Jumlah
1	Apakah ada sidak yang dilakukan oleh Bidang Pasar	3	2	8	13
2	Sanksi yang diberikan oleh bidang pasar	24	4	0	28
3	Pelaksanaan sanksi peringatan tertulis maupun secara langsung	21	4	1	26
Jumlah		**48**	**10**	**9**	**67**

Sumber : Olahan Data Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel V.9b diatas dapat di lihat Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengrurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang pada Indikator melakukan tindakan perbaikan pada kategori Terlaksana dengan jumlah Skor 48 karena responden ini menilai bahwasanya sanksi yang diberikan sudah terlaksana, namun tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena dapat dilihat dari masih banyak pedagang yang masih berjualan tanpa memiliki kartu.

Selanjutnya dengan jumlah Skor 10 berada pada kategori Cukup terlaksana, dan dengan jumlah Skor 16 berada pada kateori Kurang Terlaksana dengan alasan bahwa tidak ada sanksi yang diberikan, karena jika dilihat masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu namun tetap bisa berjualan, Bidang Pasar hanya memperingati tidak menjatuhkan hukuman ataupun sanksi yang bisa membuat pedagang agar terdorong hatinya untuk membuat kartu tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jadi dari hasil kuisioner peneliti terhadap responden terhadap indikator Mengambil Tindakan Perbaikan jumlah Skor 67 , berada pada kategori “Kurang Terlaksana” dalam skala Inrterval 60 – 100.

C. Rekapitulasi Variabel Responden Tentang Hasil Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru

Dari hasil Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru yang diukur berdasarkan indikator-indikator diatas, maka dapat direkap tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.10a: Rekapitulasi Tanggapan responden yang sudah memiliki kartu tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Menetapkan Standar	11	10	9	30
2	Membandingkan Kinerja dengan Standar	18	8	4	30
3	Mengambil Tindakn Perbaikan	13	9	8	30
Jumlah		**42**	**27**	**21**	**90**

Sumber : olahan data peneliti 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Tabel V.10a di atas Rekapitulasi tanggapan responden yang sudah punya kartu terhadap Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) dapat dijelaskan bahwa untuk seluruh indikator, dimana dari keseluruhan Indikator yng menjawab Terlaksana dengan jumlah Skor 42, selanjutnya pada seluruh Indikator yang menjawab Cukup Terlaksana dengan jumlah Skor 27, dan untuk Skala Kurang Terlaksana memiliki jumlah Skor 21 untuk seluruh indikator jumlah Skor keseluruhan 90.

Tabel V.10b: Analisis Rekapitulasi Tanggapan responden yang sudah memiliki kartu tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana (X 3)	Cukup terlaksana (X 2)	Kurang Terlaksana (X 1)	Jumlah
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Menetapkan Standar	33	20	9	62
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	Membandingkan Kinerja dengan Standar	54	16	4	74
3	Mengambil Tindakan Perbaikan	39	18	8	65
Jumlah		**126**	**54**	**21**	**201**

Sumber : olahan data peneliti 2020

Berdasarkan Tabel V.10b diatas Rekapitulasi tanggapan responden yang sudah punya kartu tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) dapat di jelaskan bahwa untuk seluruh indikator dimana 42 jawaban dengan skor 126 menjawab

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terlaksana, sementara itu 27 jawaban dengan skor 54 menjawab Cukup Terlaksana dan 21 orang dengan skor 21 dengan jumlah skor keseluruhan 201

Jadi dapat diketahui Rekapitulasi tanggapan Responden yang sudah mempunyai kartu mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Jika di lihat dari tiga indikator penelitian tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru dengan 3 indikator yang digunakan, yaitu Menetapkan Standar, Membandingkan Kinerja dengan Standar, Mengambil Tindakan Perbaikan, jawaban Responden dapat di kategorikan "**Kurang Terlaksana**" dengan jumlah Skor 201 dalam skala Interval 180 - 300, yang artinya tiga indikator tidak semua item penilian teraksana dengan baik.

Tabel V.11a: Rekapitulasi Tanggapan responden yang belum memiliki kartu tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Menetapkan Standar	13	7	10	30
2	Membandingkan Kinerja dengan Standar	10	12	8	30
3	Mengambil Tindakn Perbaikan	16	5	9	30
Jumlah		**39**	**24**	**27**	**90**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber : olahan data peneliti 2020

Berdasarkan Tabel V.11a di atas Rekapitulasi tanggapan responden yang belum punya kartu terkait Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) dapat dijelaskan bahwa untuk seluruh indikator, dimana dari keseluruhan Indikator yng menjawab Terlaksana dengan jumlah Skor 39, selanjutnya pada seluruh Indikator yang menjawab Cukup Terlaksana dengan jumlah Skor 24, dan untuk Skala Kurang Terlaksana memiliki jumlah Skor 27 untuk seluruh indikator jumlah Skor keseluruhan 90

Tabel V.11b: Analisis Rekapitulasi Tanggapan responden yang belum memiliki kartu tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana (X 3)	Cukup terlaksana (X 2)	Kurang Terlaksana (X 1)	Jumlah
1	Menetapkan Standar	39	14	10	63
2	Membandingkan Kinerja dengan Standar	30	24	8	62
3	Mengambil Tindakn Perbaikan	48	10	9	67
Jumlah		**117**	**48**	**27**	**192**

Sumber : olahan data peneliti 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Tabel V.11b diatas Rekapitulasi tanggapan responden yang belum punya kartu tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) dapat di jelaskan bahwa untuk seluruh indikator dimana 39 jawaban dengan skor 117 menjawab Terlaksana, sementara itu 24 jawaban dengan skor 48 menjawab Cukup Terlaksana dan 27 orang dengan skor 27 dengan jumlah skor keseluruhan 192

Jadi dapat diketahui Rekapitulasi tanggapan Responden yang belum mempunyai kartu mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) Jika di lihat dari tiga indikator penelitian tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru dengan 3 indikator yang digunakan, yaitu Menetapkan Standar, Membandingkan Kinerja dengan Standar, Mengambil Tindakan Perbaikan, jawaban Responden dapat di kategorikan "**Kurang Terlaksana**" dengan jumlah Skor 192 dalam skala Interval 180 - 300, yang artinya tiga indikator tidak semua item penilian teraksana dengan baik.

D. Faktor Penghambat Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (Tdp) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru

1. Kebijakan yang dibuat oleh Bidang Pasar belum begitu kuat dalam melakukan pengawasan dikarena kan standar operasional prosedur dari Bidang Pasar belum begitu jelas sehingga dalam pengurusan kartu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanda daftar pedgang masih terdapat pedagang yang belum mau mengurus kartu tanda daftar pedagang.

2. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak menggunakan kartu tanda daftar pedagang dikarenakan pedagang beranggapan kartu tersebut tidak begitu berpengaruh sehingga mereka tidak ingin membuat kartu.
3. Meskipun dari Bidang Pasar Sendiri sudah memberikan sanksi kepada pedagang yang belum memiliki kartu, namun sanksi yang diberikan juga tidak membuat sadar dan jera pedagang yang sampai sekarang masih ada yang tidak memiliki kartu pedagang tersebut.
4. Semakin bertambahnya jumlah pedagang yang berjualan di area car free day terutama pedagang pendatang baru yang membuat bidang pasar kesulitan dalam mengecek pedagang satu persatu yang belum dan yang sudah memiliki serta mengurus kartu tanda daftar pedagang.
5. Adanya pedagang sisipan yang belum punya kartu, hanya izin dengan pedagang yang disebelahnya sudah memiliki kartu, serta banyak juga pedagang yang menepati tempat pedagang yang sudah punya kartu yang tidak hadir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian Dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru yang menggunakan 3 indikator menurut Mockler (dalam Zulkifli 2015:256) yaitu : menetapkan standar, membandingkan kinerja sesuai dengan standar, mengambil ti dakan perbaikan, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait terutama bagi Dinas Perindistrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan terkhususnya Bidang Pasar.

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Dinas Perindustrian Dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru di lihat dari beberapa indikator yang berdasarkan konsep Robert J Mockler yaitu :
    a. Menetapkan Standar yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas, harapan dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi dan program kerja yang sudah ditetapkan direalisasikan seluruhnya antara harapan yang direncanakan dan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaaan dapat tercapai. Menetapkan standar juga merupakan tahap awal dalam pengawasan adalah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menetapkan standar pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pengururs an kartu tanda daftar pedagang. Pada Hasil Kuisioner yang diperoleh peneliti terhadap indikator menetapkan standar untuk pedagang yang sudah memiliki kartu dengan jumlah Skor 62, sedangkan pedagang kaki lima yang belum memiliki kartu dengan jumlah skor 63 dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis dalam menetapkan standar dalam melakukan penawasan terkait pengurusan karu tanda daftar pedagang masuk didalam kategori "Kurang terlaksana".

b. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar, yakni pengawasan yang dilakukan oleh dinas prindustrian dan perdagangan dengan cara pemeriksaan rutin, sidak, laporan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pedagang yang berjualan diarea Car Free Day yang tidak memiliki kartu. Selain itu juga dapat dilihat apakah dalam melakukan pengawasam pihak yang turun kelapangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan diarea Car Free Day sudah sesuai dengan standar apa belum.

Pada Hasil Kuisioner yang diperoleh peneliti terhadap indikator membandingkan kinerja sesuai dengan standar pada pedagang kaki lima yang sudah memiliki kartu dengan jumlah Skor 74, sedangkan untuk pedagang kaki lima yang belum memiliki kartu berada pada skor 62 dan berdasarkan obsevasi yang telah penulis lakukan dalam membandingkan kinerja sesuai dengan standar bahwasannya Bidang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasar dalam melakukan pengawasan terkait kepemilikan kartu oleh pedagang kaki lima tidak berdasarkan standar hal ini didapatkan penulis dari penjelasan seksi penertiban dan pengawasan pedagang kaki lima, yang berada dalam penilaian “KurangTerlaksana”.

Mengambil tindakan perbaikan yaitu manakala ditemukan pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu tanda pedagang atau izin untuk berjualan di area Car Free Day perlu diambil tindakan berupa sanksi bagi yang tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Pada Hasil Kuisioner yang diperoleh peneliti terhadap indikator mengambil tindakan perbaikan pada pedagang kaki lima yang belum punya kartu dengan jumlah Skor 65 sedangkan pada pedagang yang sudah memiliki kartu berada pada skor 67 dan berdasarkan obsevasi yang telah penulis lakukan terkait pengawasan yang dilakukan oleh bidang padar dalam mengambil tindakan seperti memberikan sanksi belum optimal, yang berada pada skor “Kurang Terlaksana”.

Dari kesimpulan setiap indikator yang diambil maka peneliti menyimpulkan bahwa keseluruhan indikator pada pedagang kaki lima yang sudah memiliki kartu berada pada jumlah skor 201 dalam skala 180-300 dikategorikan pada Kurang Terlaksana, sedangkan untuk keseluruhan indikator terhadap pedagang kaki lima yang belum memiliki kartu pada jumlah skor 192 dalam skala 180-300 dikategorikan pada “Kurang Terlaksana”.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan, maka diperoleh kesimpulan mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengurusan Kartu Tanda Daftar Pedagang (TDP) (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Area Car Free Day) Kota Pekanbaru belum Optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang, penawasan ini dilakukan agar pedagang yang berjualan tidak keluar jalur yang telah ditetapkan, maka dari itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan kartu tanda daftar pedagang agar pedagang lebih tetrtib, Namun masih ditemukan pedagang yang belum memiliki kartu. Selain itu sanksi yang diberikan oleh Bidang Pasar terhadap pedagang kaki lima dapat dikatakan kurang tegas sehingga tidak meninmbulkan efek jera.

B. Saran

Dalam penelitian penulis akan menyampaikan saran, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pengawasan yang lebih efektif dan efisien hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Bidang Pasar yang mengawasi pedagang kaki lima pada saat turun kelapangan seharusnya lebih teliti serta lebih merata dalam proses pemeriksaan pedagang kaki lima terkait tentang kepemilikan kartu tanda daftar pedagang, agar pedagang yang bejualan di Area Car Free Day tersebut memang benar-benar pedagang yang sudah terdaftar dan memiliki kartu.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru khususnya Bidang Pasar yang mengawasi, hendaknya lebih tegas dalam memberikan sanksi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepada pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu tanda daftar pedagang, karena dapat dilihat bahwasannya setiap minggunya pedagang kaki lima yang berjualan kuotanya semakin bertambah sedangkan kuota yang terdaftar tidak sesuai dengan data yang masuk ke Bidang Pasar.

3. Hendaknya Bidang Pasar rutin melakukan inspeksi mendadak terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di Area Car Free Day, sehingga dapat diketahui secara langsung pedagang yang berjualan yang tidak memiliki kartu.
4. Agar pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pasar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dari itu penulis menyarankan agar menambah personil atau anggota yang turun kelapangan untuk mengawasi pedagang yang berjualan di area car free day.
5. Bagi pedagang yang kartunya sudah habis masa berlakunya agar segera memperpanjang kartu tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Bidang Pasar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hidayat, S., & Sedarmayanti. 2002. *Meto dologi Penelitian.* Bandung: Mandar Maju.

Kadir, A., & Syamsiar, S. (2011). *Panduan Menyusun Laporan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis Menggunakan Microsoft Word.* Yogyakarta: PT. Buku Seru.

Kuncoro, M. (2007). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN.

Irham, F. 2012. *Pengantar Manajemen Keuangan.* Bandung: Alfabeta.

Islamy, M Irfan. 2014. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder.* Jakarta: PT RajaGrafindo.

Misbahuddin, & I. H. (2014). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik.* Jakarta: Bumi Aksara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Noor, J. (2012). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* Indonesia: PrenadaMedia Group.

Novitasari. 2017. *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia.

Riduwan. (2014). *Metode dan Teknik Menyususn Proposal Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Binapura Aksara

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta

Siswanto. (2016). *Pengantar Manajemen.* Bandung: Bumi Aksara.

Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan.* Indonesia: Prenadamedia Group.

Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers

Sugiyono. (2014). *Statistik untuk Peneleitian.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods).* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitastif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Terry, g. R. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Zulkifli, 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen.* Pekanbaru: UIR Press

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Pekanbaru: Uir Press.

Zulkifli, Awang, A., & Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa.* Fisipol Uir.

Dokumentasi :

Badan Penerbit FISIPOL, 2013. *Buku Pedoman Penulisan.* Pekanbaru, UIR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 20 14 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Re publik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Undang-Undang No 5 tahun 1984

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 196 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pasar Rakyat, Pasar Pusat, Toko Swalayan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :